



FTIK



PERENCANAAN
WILAYAH & KOTA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



ANALISIS PERKEMBANGAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN WILAYAH KECAMATAN ILIR TIMUR I

**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2024**

KELAS RB

DOSEN PENGAMPU



**Dian Prasetyaning
Sukmawati, S.T., M.T.**



**Mentari Pratami,
S.Si., M.Si.**

ASISTEN STUDIO



**Sardo Tinambunan
121220112**



**Kristina Natalia Br S.
121220117**

ANGGOTA KELAS

ASPEK FISIK LINGKUNGAN



Annisa Oktafianasari
122220008



M. Andhika Refaldy
122220136



Reinaldi M. Alif
122220131



Firman Laoli
122220006



M. Ihsan Riandi
122220003



Rahma Fira Anisa
122220053

ASPEK INFRASTRUKTUR



Deffrant Marisi R.P.
122220185



Azzara Tri Nanda
122220072



Arum Wulandari
122220146



Grace Natama R.
122220125



Septhia Hanifah
122220167



Amey Shifa W.H.
122220051



Amandha Agus Z.
122220009

ASPEK SPASIAL KERUANGAN



Noer Allma Cita Izah
122220183



Najla Thifa Ajeng S.
122220181



Jhon Kaleb S.
122220076



Marchel Winanza
122220068



Elizabeth Angie J.
122220210



Maria Angelina S.
122220166

ASPEK SOSIAL KEPENDUDUKAN



Sasya Mekka Sari
122220091



Mestika Rahmah
122220106



Triana Septiani
122220144



Sisca Ananda Celine
122220129

ASPEK SOSIAL EKONOMI



Fahni Eka Saputri
122220035



Inez Kenya P.
122220037



Jelita Meilani S.
122220105



Devi Ria Ananta P. S.
122220092

ASPEK KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN



Izreel Rivaldo Sitompul
122220187



Yumna Najwa Ikhsan
122220070



Tari Yusar Falas
122220024



Silvia Rivani
122220023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian pada Kecamatan Ilir Timur I. Pada Kecamatan Ilir Timur I kami membuat laporan penelitian yang berjudul “Analisis Perkembangan Sektor Perdagangan dan Jasa guna Meningkatkan Perekonomian Wilayah Kecamatan Ilir Timur I” yang dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Laporan penelitian ini kami ajukan dan buat guna sebagai pemenuhan kelulusan dari Mata Kuliah Studio Proses Perencanaan, Institut Teknologi Sumatera.

Laporan penelitian ini diselesaikan semata karena untuk menerima banyak bantuan dan dukungan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dian Prasetyaning Sukmawati, S.T., M.T. selaku Dosen pengampu Studio Proses Perencanaan kelas RB.
2. Mentari Pratami, S.SI., M.SI. selaku Dosen pengampu Studio Proses Perencanaan kelas RB.
3. Sardo Tinambunan, selaku Asisten Studio Proses Perencanaan kelas RB.
4. Kristina Natalia Br Sinaga, selaku Asisten Studio Proses Perencanaan kelas RB.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati. Akhir kata, kami berharap semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Lampung Selatan, 22 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Dan Sasaran.....	10
1.3.1 Tujuan.....	10
1.3.2 Sasaran.....	10
1.3.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan.....	10
1.4 Ruang Lingkup.....	11
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	11
1.4.2 Ruang Lingkup Materi.....	13
1.4.3 Ruang Lingkup Waktu.....	14
1.5 Kerangka Berpikir.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	17
TINJAUAN LITERATUR.....	17
2.1 Tinjauan Literatur Terkait Isu.....	17
2.1.1 Kawasan Perdagangan dan Jasa.....	17
2.2 Tinjauan Literatur Berdasarkan Aspek.....	17
2.2.1 Tinjauan Berdasarkan Aspek Fisik Lingkungan.....	17
2.2.1.1 Fisik dan Lingkungan.....	18
2.2.1.1.1 Topografi.....	18
2.2.1.1.2 Jenis Tanah.....	18
2.2.1.1.3 Curah Hujan.....	18
2.2.1.2 Analisis Kemampuan Lahan.....	19
2.2.2 Tinjauan Berdasarkan Aspek Infrastruktur dan Pergerakan.....	20
2.2.2.1 Pengertian Infrastruktur.....	20
2.2.2.2 Jenis-Jenis Infrastruktur.....	21
2.2.3 Tinjauan Berdasarkan Aspek Spasial Keruangan.....	21
2.2.3.1 Pengertian Spasial Keruangan.....	21
2.2.3.2 Pengertian Rencana Struktur Ruang.....	22
2.2.3.3 Pengertian Rencana Pola Ruang.....	25
2.2.3.4 Pengertian Kawasan Strategis.....	27

2.2.4	Tinjauan Berdasarkan Aspek Sosial Kependudukan.....	28
2.2.4.1	Pengertian Sosial Kependudukan.....	28
2.2.4.2	Cakupan Sosial Kependudukan.....	28
2.2.5	Tinjauan Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi.....	28
2.2.5.1	Pembangunan Ekonomi.....	29
2.2.5.2	Pengertian Ekonomi.....	29
2.2.5.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.2.5.4	Produk Domestik Regional Bruto.....	30
2.2.5.5	Pendapatan Perkapita.....	30
2.2.5.6	Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	31
2.2.5.7	Pengolahan dan Pemasaran.....	32
2.2.6	Tinjauan Berdasarkan Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan.....	33
2.2.6.1	Pengertian Kelembagaan.....	33
2.2.6.2	Pengertian Pembiayaan.....	34
2.2.6.3	Pengertian UMKM.....	34
2.2.6.4	Pengertian Perdagangan dan Jasa.....	35
BAB III.....		36
GAMBARAN UMUM.....		36
3.1	Gambaran Umum Wilayah Kota Palembang.....	36
	Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Palembang.....	36
3.1.1	Kedudukan Wilayah.....	37
3.1.2	Geografi Wilayah Kota Palembang.....	39
3.1.3	Jumlah Penduduk Kota Palembang.....	39
3.2	Gambaran Umum Kecamatan Ilir Timur I.....	40
3.3	Gambaran Umum Aspek.....	41
3.3.1	Fisik Lingkungan.....	41
3.3.1.1	Topografi.....	42
3.3.1.2	Jenis Tanah.....	43
3.3.1.3	Curah Hujan.....	44
3.3.2	Infrastruktur dan Pergerakan.....	44
3.3.2.1	Sarana.....	45
3.3.2.2	Prasarana.....	48
3.3.2.3	Utilitas.....	51
3.3.3	Spasial Keruangan.....	53
3.3.3.1	Tata Guna Lahan.....	54
3.3.3.2	Pola Ruang.....	55
3.3.3.3	Jalan.....	55
3.3.4	Sosial dan Kependudukan.....	56
3.3.5	Sosial Ekonomi.....	56
3.3.6	Kelembagaan dan Pembiayaan.....	57

BAB IV.....	62
METODE PENELITIAN.....	62
4.1 Matriks Data.....	62
4.2 Identifikasi Kebutuhan Data.....	62
4.2.1 Fisik Lingkungan.....	62
4.2.2 Infrastruktur dan Pergerakan.....	63
4.2.3 Spasial Keruangan.....	63
4.2.4 Sosial Kependudukan.....	63
4.2.5 Sosial Ekonomi.....	64
4.2.6 Kelembagaan dan Pembiayaan.....	64
4.3 Metode Pengumpulan Data.....	65
4.3.1 Pengumpulan Data Primer.....	65
4.3.2 Pengumpulan Data Sekunder.....	65
4.4 Metode Pengumpulan Sampel.....	65
4.5 Metode Analisis Data.....	67
4.5.1 Analisis Spasial Overlay.....	67
4.5.2 Analisis Skalogram.....	68
4.5.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	69
4.5.4 Analisis Kuantitatif.....	69
4.5.5 Analisis Kualitatif.....	70
4.5.6 Analisis Kemampuan Lahan.....	70
4.5.7 Analisis Kesesuaian Lahan.....	71
4.5.8 Analisis Proyeksi.....	71
4.5.9 Analisis Produk Domestik regional Bruto (PDRB).....	72
4.5.10 Analisis Location Quotient (LQ).....	72
4.5.11 Analisis Shift Share.....	73
4.5.12 Analisis Tipologi Klassen Sektoral.....	73
4.5.13 Analisis Tipologi Klassen Wilayah.....	74
4.5.14 Analisis Time Series.....	74
4.5.15 Analisis Stakeholder.....	74
Bab V.....	76
Rencana Kegiatan.....	76
5.1 Rencana Kegiatan Studio.....	76
5.2 Rencana Kegiatan Survey.....	77
5.3 Alokasi atau Mobilisasi Survey.....	78
5.4 Struktur Organisasi.....	84
5.5 Rencana Anggaran Belanja.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Ilir Timur I.....	14
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Palembang.....	38
Gambar 3.2 Peta Administrasi Kecamatan Ilir Timur I.....	42
Gambar 3.3 Peta Topografi Kecamatan Ilir Timur I.....	44
Gambar 3.4 Peta Jenis Tanah Kecamatan Ilir Timur I.....	45
Gambar 3.5 Peta Curah Hujan Kecamatan Ilir Timur I.....	46
Gambar 3.6 Peta Persebaran Sarana Perdagangan dan Jasa Kecamatan Ilir Timur I.....	47
Gambar 3.7 Peta Persebaran Sarana Kesehatan Kecamatan Ilir Timur I.....	48
Gambar 3.8 Peta Persebaran Sarana Pendidikan Kecamatan Ilir Timur I.....	49
Gambar 3.9 Peta Jaringan Jalan Kecamatan Ilir Timur I.....	50
Gambar 3.10 Peta Jaringan Drainase Kecamatan Ilir Timur I.....	52
Gambar 3.11 Peta Jaringan Pipa PDAM Kecamatan Ilir Timur I.....	54
Gambar 3.12 Peta Tata Guna Lahan Kecamatan Ilir Timur I.....	56
Gambar 3.13 Peta Pola Ruang Kecamatan Ilir Timur I.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Timeline Studio Selama Satu Semester.....	79
Tabel 2. Tabel Nama Kelompok.....	81
Tabel 3. Tabel Timeline Survey Studio.....	81
Tabel 4. Tabel Daftar Nama Peserta Kelas.....	88
Tabel 5. Tabel Anggaran Belanja.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palembang adalah Ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 352,51 km². Kota Palembang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.729.546 jiwa dengan rasio jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 865.942 jiwa dan Perempuan sebanyak 863.604 jiwa (BPS Kota Palembang 2022). Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 dinyatakan bahwa Kecamatan Ilir Timur 1 merupakan bagian dari lingkup wilayah Kota Palembang.

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032, Kecamatan Ilir Timur 1 merupakan salah satu kawasan Pusat Pelayanan Kota atau PPK di Kota Palembang, terletak sekitar 1 km dari pusat kota Palembang. Kecamatan Ilir Timur 1 memiliki luas 6,39 km² dengan total jumlah penduduk sebanyak 67.124 jiwa dengan rasio jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 32.581 jiwa dan Perempuan sebanyak 34.543 jiwa (BPS Kecamatan Ilir Timur 1 2022). Kecamatan Ilir Timur 1 memiliki banyak potensi sebagai pusat dari Kota Palembang, seperti kawasan komersial yang strategis, kawasan permukiman yang baik dan terarah dan kawasan pariwisata. Maka dari itu kami akan menganalisis pengembangan sektor perdagangan dan jasa guna meningkatkan perekonomian wilayah di Kecamatan Ilir Timur 1.

Hal yang melatarbelakangi kami dalam melakukan Studio Proses Perencanaan yang ada di Kecamatan Ilir Timur 1 yaitu untuk menganalisis potensi, masalah dan isu strategis yang terjadi di kecamatan tersebut baik dari Aspek Fisik Lingkungan, Infrastruktur, Spasial Keruangan, Sosial Kependudukan, Sosial Ekonomi serta Kelembagaan dan Pembiayaan dari informasi yang kami dapatkan secara sekunder dengan kondisi eksisting yang ada saat kami melakukan survey. Dengan harapan kami dapat mengetahui dan membantu meningkatkan potensi dan menurunkan masalah ataupun isu yang terjadi di studi wilayah yang kami ambil. Oleh sebab itu, pengumpulan data merupakan sebuah hal yang penting untuk dilakukan untuk memastikan dan menjamin keakuratan dari hasil pengenalan dari Kecamatan Ilir Timur 1.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi fisik dan lingkungan akibat kegiatan perdagangan dan jasa kec. Ilir Timur 1?
2. Bagaimana ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur I?
3. Bagaimana penataan ruang kawasan perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian wilayah di Kecamatan Ilir Timur I?
4. Bagaimana kondisi sosial kependudukan dalam mendukung perkembangan sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur I?
5. Apa sektor unggulan kecamatan Ilir Timur I pada PDRB Kota Palembang?
6. Bagaimana peran dan fungsi lembaga pemerintah dalam meningkatkan sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang?

1.3 Tujuan Dan Sasaran

Berikut merupakan tujuan, sasaran dan dasar hukum dalam penyusunan pada laporan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Teroptimalisasinya Perkembangan Sektor Perdagangan dan Jasa guna meningkatkan perekonomian wilayah Kecamatan Ilir Timur I

1.3.2 Sasaran

- Mengidentifikasi kondisi fisik dan lingkungan untuk dijadikan kawasan perdagangan dan jasa, kecamatan Ilir Timur 1
- Mengidentifikasi sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1
- Mengidentifikasi penataan ruang perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1
- Mengidentifikasi kondisi sosial kependudukan masyarakat dalam mendukung perkembangan sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1
- Mengidentifikasi hasil PDRB Kota Palembang dalam sektor potensial industri pengolahan dengan perekonomian kecamatan Ilir Timur I
- Mengidentifikasi peran dan fungsi lembaga pemerintah dalam meningkatkan sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang

1.3.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Dasar hukum penyusunan laporan tentang analisis perkembangan sektor perdagangan dan jasa guna meningkatkan perekonomian wilayah Kecamatan Ilir

Timur 1 terdiri dari berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Indonesia. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang terkait:

1. Peraturan menurut sumber Standar Nasional dalam pengelolaan serta penggunaan sarana, prasarana dan utilitas. Standar Nasional Indonesia yang di pakai adalah 03 - 1733 - 2004.
2. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Menyatakan jasa sebagai setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain.
3. UU Perdagangan : Menyatakan bahwa jasa adalah sektor yang diatur dalam UU Perdagangan, dengan lingkup pengaturan yang meliputi 12 sektor, termasuk jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa kesehatan sosial, jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga, jasa pariwisata, jasa transportasi dan jasa lainnya.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial : merupakan undang-undang yang berisi tentang kewajiban negara untuk melindungi kebutuhan dasar warga negara dan mengembangkan kesejahteraan sosial

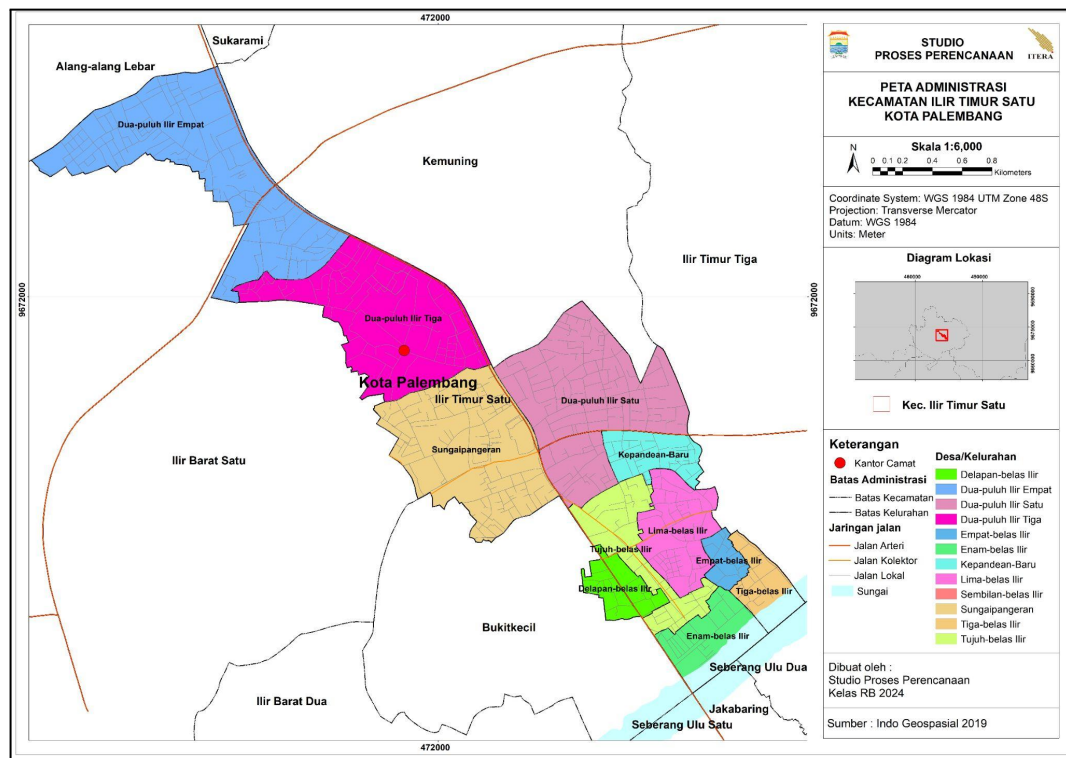
Dalam penyusunan laporan tentang analisis perkembangan sektor perdagangan dan jasa guna meningkatkan perekonomian wilayah Kecamatan Ilir Timur I, perlu mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan ekonomi, seperti pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur.

1.4 Ruang Lingkup

Berikut ruang lingkup pada penyusunan laporan pendahuluan yang mencakup ruang lingkup wilayah, materi dan waktu.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam studio proses perencanaan ini adalah wilayah Kecamatan Ilir Timur 1. Wilayah Kecamatan Ilir Timur 1 terdiri dari 11 Kelurahan yang meliputi Kelurahan 13 Ilir, Kelurahan 14 Ilir, Kelurahan 15 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 17 Ilir, Kelurahan 18 Ilir, Kelurahan 20 Ilir D 1, Kelurahan 20 Ilir D III, Kelurahan 20 Ilir D IV, Kelurahan Sei Pangeran, Kelurahan Kepandean Baru, dan Kelurahan Sungai Pangeran.



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam studio proses perencanaan ini mencakup suatu proses perencanaan di suatu wilayah studi melalui tahapan perencanaan, dimulai dari pemahaman wilayah studi, identifikasi isu, permasalahan wilayah studi, pengumpulan data, serta analisis data. Beberapa aspek yang ditinjau dalam penelitian ini antara lain:

1. Aspek Fisik dan Lingkungan

Aspek fisik lingkungan mencakup karakteristik fisik dan geografis dari Kecamatan Ilir Timur 1, termasuk topografi, jenis tanah, curah hujan, serta membahas risiko bencana alam seperti banjir, dan cuaca ekstrem serta upaya mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko bencana.

2. Aspek Spasial Keruangan

Aspek Spasial Keruangan mencakup pola ruang atau pun struktur ruang berdasarkan ketentuan yang telah diatur dan tinjauan kebijakan yang ada pada dokumen RTRW serta konstelasi dari wilayah mikro terhadap wilayah makro. Serta membahas pengoptimalan penataan ruang di Kecamatan Ilir Timur 1 sesuai dari tinjauan kebijakan yang ada pada daerah.

3. Aspek Infrastruktur

Aspek Infrastruktur membahas mengenai ketersediaan infrastruktur dasar dalam menunjang kegiatan agropolitan di Kecamatan Ilir Timur 1 meliputi sarana pendidikan, jaringan telekomunikasi, jaringan irigasi, jaringan drainase, infrastruktur jalan, dan sarana industri perdagangan dan jasa.

4. Aspek Sosial dan kependudukan

Sosial kependudukan berhubungan dengan dinamika kependudukan, termasuk ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana populasi berubah seiring waktu karena kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Sosial kependudukan juga mengacu pada tingkat pendidikan, mata pencaharian masyarakat dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kecamatan Alang Alang Lebar dan Ilir Timur I. Sosial kependudukan juga membahas mengenai potensi, masalah dan kondisi penduduk yang berhubungan dengan kegiatan industri dan perdagangan jasa di kecamatan Alang Alang Lebar dan Ilir Timur I.

5. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek Sosial Ekonomi membahas mengenai permasalahan ekonomi di Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Ilir Timur 1 dimana meliputi Aktivitas ekonomi masyarakat, Pendapatan Domestik Regional Bruto dengan 17 sektor, menghitung analisis Location Quotient, Analisis

Shift Share, laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi serta tipologi klassen sektoral dan wilayah dalam rangka perhitungan sektor unggulan di wilayah tersebut.

6. Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan membahas mengenai peran, fungsi dan tindakan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam kebijakan meningkatkan sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan juga membahas mengenai program kerja pemerintah dan alur pembiayaan dalam meningkatkan sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1.

1.4.3 Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian serta penyusunan laporan hasil penelitian yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1) Tahap Pra- survei

Tahapan ini dilakukan mulai dari tanggal 30 Januari 2024 hingga 23 Maret 2024, tahap ini meliputi pemantapan isu terkait wilayah studi, pemilihan topik dan judul, penentuan rumusan masalah, tujuan dan sasaran, persiapan perizinan, penetapan survei, penyusunan perangkat survei dan persiapan teknis untuk survei lapangan.

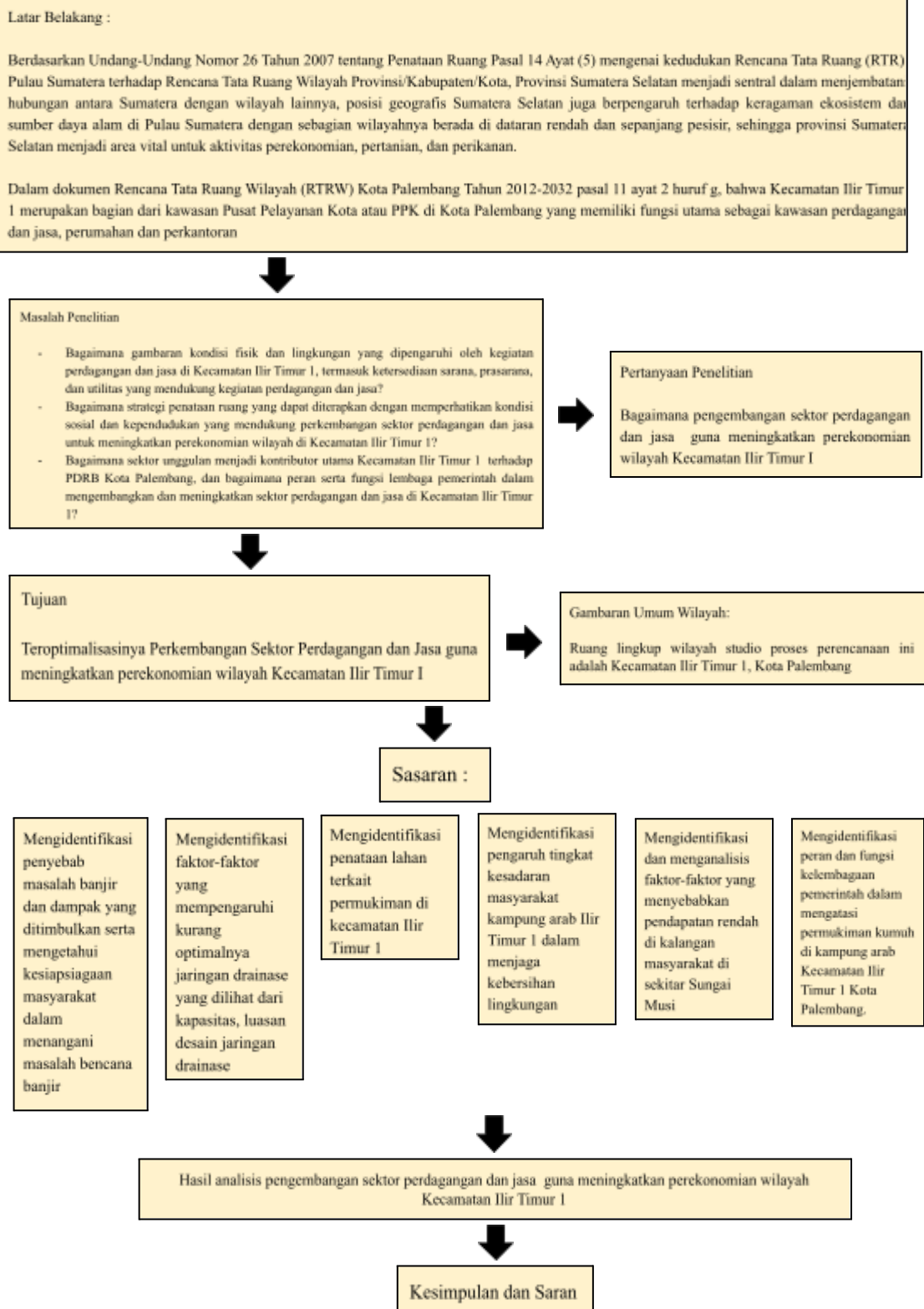
2) Tahap Survei

Tahap ini dilakukan pada tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024. Tahap ini meliputi pengambilan data primer berupa observasi kondisi wilayah studi, pembagian kuisioner dan wawancara kepada masyarakat, serta pencarian data sekunder dari instansi pemerintah terkait data yang dibutuhkan.

3) Tahap Pasca Survei

Tahap ini dilakukan pada tanggal 02 April 2024 sampai 07 Mei 2024. Tahap ini meliputi pengumpulan data primer dan sekunder yang didapatkan selama tahapan Pra - Survei dan Survei, serta proses analisis data yang dilanjutkan dengan pencetakan laporan.

1.5 Kerangka Berpikir



1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, laporan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, ruang lingkup, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini akan menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam pemecahan masalah. Bab ini memuat tinjauan literasi terkait isu yang berisi penjelasan teoritis dari keseluruhan aspek kewilayahan yang menjadi dasar penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini memuat deskripsi singkat mengenai gambaran umum wilayah penelitian secara makro dan mikro. Gambaran umum wilayah secara makro memuat kedudukan wilayah, batas administrasi, kondisi geografi, dan jumlah penduduk. Gambaran umum wilayah secara mikro memuat deskripsi singkat dari setiap aspek kewilayahan.

BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode penelitian yang berisi langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdapat matrix data, identifikasi kebutuhan berdasarkan aspek-aspek kewilayahan, metode pengumpulan data, metode pengumpulan sampel, dan metode analisis data.

BAB V RENCANA KEGIATAN

Pada bab ini memuat rencana kegiatan studio dan survey, alokasi atau mobilisasi survey, struktur organisasi, dan rencana anggaran belanja selama kegiatan survey di wilayah kajian penelitian.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Literatur Terkait Isu

Kajian terhadap literatur mengenai permasalahan perdagangan dan jasa menunjukkan bahwa perdagangan dan jasa merupakan bidang yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Perdagangan dan jasa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diartikan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perdagangan dan jasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan kota, sehingga perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di suatu daerah sangat erat kaitannya dengan kepentingan penduduk, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi.

2.1.1 Kawasan Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan jasa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diartikan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Tujuan dari perdagangan dan jasa ini merupakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing dan lainnya. Kawasan perdagangan dan jasa atau yang disebut juga sebagai kawasan komersial memiliki fungsi utama pelayanan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan kota, kegiatan perdagangan dan jasa merupakan potensi unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan suatu kota.

2.2 Tinjauan Literatur Berdasarkan Aspek

Tinjauan literatur berdasarkan aspek memuat informasi mengenai pengetahuan dari berbagai macam aspek, diantaranya yaitu aspek fisik lingkungan, infrastruktur, spasial keruangan, sosial kependudukan, sosial ekonomi, serta kelembagaan dan pembiayaan.

2.2.1 Tinjauan Berdasarkan Aspek Fisik Lingkungan

Berikut merupakan tinjauan berdasarkan aspek fisik lingkungan yang memuat pengertian fisik lingkungan, topografi, jenis tanah dan curah hujan.

2.2.1.1 Fisik dan Lingkungan

Fisik dan lingkungan merupakan dua istilah yang berbeda akan tetapi memiliki keterkaitan dalam ilmu lingkungan dan sains alam. Fisik berkaitan dengan semua hal yang berhubungan dengan sifat dan karakteristik benda dan materi seperti struktur, bentuk, ukuran dan komposisi kimia. Dalam konteks lingkungan fisik dapat merujuk pada segala sesuatu yang bersifat material seperti tanah, air, udara dan iklim. Dalam kajian lingkungan aspek fisik sangat penting untuk mengetahui karakteristik fisik lingkungan dan bagaimana lingkungan tersebut dapat mempengaruhi makhluk hidup dan manusia.

Sementara itu, lingkungan merujuk pada segala sesuatu yang mempengaruhi makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mencakup semua aspek fisik biologis dan sosial dari suatu wilayah atau lokasi seperti iklim, tanah, air, flora, fauna serta keberadaan manusia dan aktivitasnya. Dalam kajian lingkungan, fisik dan lingkungan adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi fisik dari suatu wilayah akan sangat mempengaruhi lingkungan di dalamnya seperti kondisi tanah dan air yang akan mempengaruhi keberadaan flora dan fauna. Sebaliknya keberadaan manusia dan aktivitasnya juga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan lingkungan suatu wilayah seperti pencemaran yang dapat merusak kondisi lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

2.2.1.1.1 Topografi

Topografi adalah bentuk permukaan dan struktur bumi. Topografi suatu wilayah dapat dibuat dalam bentuk peta yang meliputi tinggi rendahnya suatu daerah.

2.2.1.1.2 Jenis Tanah

Tanah adalah permukaan bumi yang tersusun dari partikel mineral dan struktur organik lainnya. Tanah tersusun dari agregat mineral padat (butiran) yang tidak tersemen (terikat secara kimia) dan bahan organik yang lapuk (mengandung partikel padat), dengan zat cair dan gas mengalir di antara keduanya ruang kosong partikel padat (Das, 1995). Jenis tanah merupakan klasifikasi tanah berdasarkan sifat dan kandungan mineralnya.

2.2.1.1.3 Curah Hujan

Menurut Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika, Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam suatu wadah penakar hujan yang datar, tidak menyerap, tidak mengalir dan meresap. Curah Hujan suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah seperti ketinggian dan elevasi suatu wilayah.

2.2.1.2 Analisis Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian atas kemampuan lahan untuk penggunaan tertentu yang dinilai dari masing-masing faktor penghambat. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan tidak diikuti dengan usaha konservasi tanah yang baik akan mempercepat terjadi erosi. Terdapat beberapa Satuan Kemampuan Lahan (SKL) diantaranya yaitu:

- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

Bentang alam atau morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan sifat alam yang berasal dari permukaan bumi. Melakukan pemilihan bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya.
- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Melakukan analisis guna mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan untuk digali dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan.
- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

Lereng adalah suatu bidang di permukaan tanah yang menghubungkan permukaan tanah yang lebih tinggi dengan permukaan tanah yang lebih rendah. Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lereng di wilayah dan/atau kawasan dalam menerima beban pada pengembangan wilayah dan/atau kawasan.
- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

Menurut Sardjono (1988), pondasi adalah salah satu dari konstruksi bangunan yang terletak dibagian bawah sebuah konstruksi, pondasi mempunyai peran penting terhadap sebuah bangunan, dimana pondasi menanggung semua beban konstruksi bagian atas ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya. Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan.
- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

Ketersediaan air adalah sumberdaya air yang berasal dari air hujan (atmosferik), air permukaan, dan air tanah. Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat ketersediaan air guna pengembangan kawasan, dan kemampuan penyediaan air masing-masing lingkungan.
- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Drainase

Drainase merupakan sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air, baik kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun air yang berada dibawah permukaan tanah. Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam memutuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari.

- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi

Erosi adalah suatu proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut oleh kekuatan air, angin, sungai atau gravitasi. Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat keterkikisan tanah di wilayah dan/atau kawasan perencanaan, mengetahui ketahanan lahan terhadap erosi, memperoleh gambaran batasan pada masing-masing tingkatan pada erosi.

- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah

Limbah adalah sisa atau hasil samping dari suatu proses produksi, konsumsi, atau kegiatan manusia yang tidak diinginkan atau tidak memiliki nilai ekonomi. Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dalam pengembangan wilayah dan/atau kawasan.

- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut.

2.2.2 Tinjauan Berdasarkan Aspek Infrastruktur dan Pergerakan

Berikut merupakan tinjauan berdasarkan aspek infrastruktur yang memuat pengertian infrastruktur dan jenis-jenis infrastruktur.

2.2.2.1 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan jenis fasilitas baik sarana, prasarana dan utilitas yang mendukung kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa Pendapat ahli mengenai infrastruktur. Menurut Neil S. Grigg Infrastruktur merupakan sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Selanjutnya Pengertian infrastruktur menurut Robert J. Kodoatie adalah suatu sistem yang menunjang sistem ekonomi dan sosial yang sekaligus menjadi perantara sistem lingkungan. Dimana sistem tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengambil kebijakan. Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka Infrastruktur merupakan suatu sistem yang terbentuk dari bagian-bagian berupa sarana, prasarana dan utilitas yang tidak terpisahkan untuk mendukung kegiatan industri, pertanian serta pembangunan ekonomi lainnya.

Pada pasal 1 angka 65 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktural agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Belanja infrastruktur yang dimaksud adalah belanja yang berkaitan langsung dengan percepatan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

2.2.2.2 Jenis-Jenis Infrastruktur

Infrastruktur terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Infrastruktur Prasarana

Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana merupakan fasilitas yang tidak bergerak. Contoh : jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, dan jaringan irigasi.

2. Infrastruktur Sarana

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Contoh : sarana pendidikan dan sarana kesehatan

3. Infrastruktur Utilitas

Utilitas merupakan suatu barang atau jasa yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakannya. Utilitas dalam infrastruktur biasanya terkait dengan layanan penyediaan listrik, telephone, jaringan internet, dan gas.

2.2.3 Tinjauan Berdasarkan Aspek Spasial Keruangan

Berikut merupakan tinjauan berdasarkan aspek spasial keruangan yang memuat pengertian spasial keruangan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

2.2.3.1 Pengertian Spasial Keruangan

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana yang dimaksud perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang dimana telah dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 “Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang”.

Pada dasarnya, analisis spasial adalah analisis lokasi terperinci yang berfokus pada tiga faktor geografis : jarak, interaksi, dan pergerakan. Analisis spasial juga merupakan metode analisis yang fokus membahas keberadaan ruang sebagai wadah segala aktivitas manusia. Ruang sendiri erat kaitannya dengan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

Aspek spasial dan keruangan mengacu pada tinjauan struktur ruang, pola ruang dan peruntukan kawasan strategis dalam dokumen RTRW, tinjauan kebijakan berdasarkan dokumen terkait, dan konstelasi wilayah berdasarkan tentang wilayah yang tercantum. Aspek spasial dan keruangan berfungsi untuk memastikan kondisi penggunaan lahan eksisting, sistem jaringan infrastruktur sesuai dengan peruntukannya berdasarkan RTRW dan dokumen terkait.

2.2.3.2 Pengertian Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang merupakan sebuah gambaran terhadap susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarki dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang kabupaten. Isi Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang di antaranya meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan per kelurahan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, serta sistem jaringan transportasi.

1. Sistem Pusat Permukiman

- a. Pusat permukiman adalah kawasan yang menjadi inti dari semua kegiatan di sekitarnya yang terdapat berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.
- b. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa kabupaten/kota serta memiliki peran penting dalam menyediakan layanan untuk kegiatan yang berskala besar dan beragam.
- c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKLp) adalah bagian dari sistem perkotaan nasional dan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan dibuat berdasarkan beberapa kriteria.
- f. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah pusat kegiatan lokal yang kemudian hari akan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKLp merupakan bagian dari sistem perkotaan nasional dan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

- g. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan atau pusat permukiman perkotaan di daerah Kabupaten yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- h. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan kawasan perkotaan atau pusat permukiman perkotaan di daerah Kabupaten yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

2. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana sendiri merupakan salah satu fasilitas fisik mendasar yang memungkinkan lingkungan, kawasan, kota, dan kawasan (ruang spasial) dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perencanaan struktur ruang terdiri dari beberapa sistem jaringan prasarana, antara lain:

a. Sistem Jaringan Transportasi

Salah satu contoh sistem jaringan transportasi adalah sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Sistem jaringan jalan ini sendiri terdiri dari jalan umum, terminal penumpang dan jembatan. Jalan umum terdiri dari Jalan arteri, yang merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan kolektor, jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dan Pusat Kegiatan Lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal. Jalan lokal, jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar pusat Kegiatan Lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

b. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi merupakan jaringan prasarana ketenagalistrikan berupa jaringan prasarana distribusi tenaga listrik beserta fasilitas pendukungnya. Jaringan prasarana distribusi tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara

Tegangan Tinggi (SUTT) dan jaringan prasarana lainnya seperti gardu induk.

Sistem jaringan energi merupakan kumpulan pusat tenaga dan pusat beban yang saling berhubungan melalui jaringan transmisi dan distribusi sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan. Pusat-pusat pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, dan PLTP menghasilkan listrik. Energi listrik tersebut kemudian disalurkan melalui saluran transmisi dan didistribusikan ke beban melalui saluran distribusi.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi adalah serangkaian peralatan dan perlengkapan telekomunikasi yang digunakan untuk melaksanakan fungsi telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi merupakan bagian dari kegiatan telekomunikasi yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Pembangunan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan tetap. Pengembangan sistem jaringan kabel komunikasi bawah tanah dengan sistem saluran dan terintegrasi dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya. Memfasilitasi pengembangan usaha jasa telekomunikasi penyelenggara swasta/BUMN. Menyelenggarakan dan meningkatkan investasi pada Basic Transceiver Station (BTS) serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan komersial warga.

d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah sumber air dan tenaga air yang dikandung, sedangkan air adalah segala bentuk air yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi, termasuk menurut definisinya adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut di darat. Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang didistribusikan dan dikelola oleh berbagai instansi. Jaringan informasi sumber daya air harus dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Prasarana sumber daya air terdiri atas jaringan irigasi primer, tersier, dan sekunder serta bangunan sumber daya air.

e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri sebagai berikut :

- 1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dimana terdiri dari jaringan perpipaan yang terdiri dari unit Air Baku dan Unit Distribusi.
- 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa sistem pembuangan limbah rumah tangga (domestik). Sistem jaringan sampah terdiri atas fasilitas Tempat Pembuangan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); Tempat Penampungan Sementara

- (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- 3) Tempat Evakuasi Bencana yang terdiri dari Tempat Evakuasi Bencana Banjir, Tempat Evakuasi Bencana Tanah Longsor, dan Tempat Evakuasi Bencana Gempa Bumi.
 - 4) Sistem drainase terdiri dari Jaringan Drainase Primer dan Jaringan Drainase Sekunder.

2.2.3.3 Pengertian Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, serta budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung dapat mencakup kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan jenis hutan lainnya. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai ciri khas yang memungkinkan untuk melindungi kawasan di sekitarnya dan sub kawasannya sebagai mencegah banjir, menyimpan air tanah, mencegah erosi dan longsor, aspek kesuburan tanah, habitat flora dan fauna, kawasan penelitian dan wisata.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia serta memiliki tujuan khusus dalam pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, atau kegiatan budidaya lainnya.

- a. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan konversi.
- b. Kawasan hutan kemasyarakatan
- c. Kawasan pertanian yang dapat dirinci : Pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan hortikultura.
- d. Kawasan perkebunan, perkebunan di negara tersebut dapat diklasifikasikan menurut jenis bahan bakunya.

3. Kawasan Peternakan

Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau

perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung, suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan harus memperhatikan optimalisasi sumberdaya lokal dan strategi kebijakan pembangunan daerah.

4. Kawasan Perikanan

- a. Sektor perikanan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi hingga produksi, pengolahan, dan penjualan, yang dilakukan berdasarkan sistem pengelolaan perikanan.
- b. Kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang tujuan utamanya adalah budidaya ikan, berdasarkan ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi lingkungan, dan status infrastruktur publik yang ada.

5. Kawasan Pertambangan dan Energi

- a. Sektor pertambangan dan energi meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan dan pengembangan mineral atau batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemasaran pascatambang.
- b. Wilayah pertambangan bijih logam adalah bagian wilayah pertambangan yang mempunyai tersedia data, potensi, dan/atau informasi geologi dan pada dasarnya mengandung aset pertambangan bijih logam.
- c. Wilayah peruntukan penambangan batuan adalah bagian wilayah penambangan yang mempunyai ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi dan terutama mengandung bahan baku penambangan batuan.

6. Kawasan Pariwisata

Kawasan wisata yang dapat diuraikan secara rinci meliputi peruntukan kawasan sebagai berikut: Segala jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman hiburan dan wisata lainnya.

7. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung dan berfungsi sebagai lingkungan hidup serta tempat beraktivitas di kawasan perkotaan.

8. Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan permukiman pedesaan adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kemajuan ekonomi, mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

9. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, seperti menyediakan udara bersih, menjaga suhu udara, menjadi tempat rekreasi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. RTH dapat berupa taman, hutan kota, taman kota, atau tempat perkebunan yang digunakan untuk keperluan publik.

10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan negara (KPKN) adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. KPKN memiliki fungsi utama untuk mendukung kemajuan ekonomi, mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. KPKN dapat berupa area militer, area strategis, atau tempat rekreasi yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan

11. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri secara rinci meliputi kawasan peruntukan sebagai berikut: Industri kecil/perumahan, industri pertanian, industri ringan, industri berat, industri petrokimia dan industri lainnya.

2.2.3.4 Pengertian Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah bagian kota yang menjadi prioritas penataan ruangnya karena mempunyai dampak yang sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan. Kawasan strategis sendiri ada dua jenis, yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial budaya, antara lain:

1. Kawasan Minapolitan

Kawasan metropolitan merupakan kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan yang dikembangkan secara terpadu oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja dan pendapatan lokal bagi daerah.

2. Kawasan Agropolitan

Kawasan Agropolitik adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan di suatu pedesaan sebagai suatu sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu, yang adanya hubungan fungsional dan hirarki unit ke ruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

2.2.4 Tinjauan Berdasarkan Aspek Sosial Kependudukan

Berikut merupakan tinjauan berdasarkan aspek sosial kependudukan yang memuat pengertian sosial kependudukan dan cakupan sosial kependudukan.

2.2.4.1 Pengertian Sosial Kependudukan

Penduduk merupakan warga negara Indonesia dan juga orang asing yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan kependudukan itu merupakan suatu yang berkaitan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, usia, agama, persebaran, pernikahan, kehamilan, kelahiran kematian, mobilitas dan kualitas, dan juga tentang ketahanannya yang terkait dengan ekonomi, politik, sosial dan budayanya.

Kualitas penduduk mengacu pada keadaan penduduk baik dari aspek fisik maupun dari aspek non fisik, yang meliputi tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar pengembangan keterampilan, dan menjalani kehidupan yang layak.

Menurut para ahli ilmu kependudukan (Demografi) berbeda dengan studi - studi tentang kependudukan. Demografi itu berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti penduduk dan graphien yang berarti tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang suatu kependudukan yang merupakan kajian ilmiah tentang jumlah, sebaran, komposisi penduduk dan bagaimana ketiga faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Terdapat 2 ilmu demografi yaitu ilmu demografi kuantitatif dan ilmu demografi kualitatif. Demografi kuantitatif (demografi formal) lebih banyak menggunakan perhitungan statistik dan matematis, Ilmu demografi kualitatif lebih banyak menggambarkan aspek suatu populasi secara deskriptif analisis. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena, dan permasalahan kependudukan dan kaitannya dengan keadaan sosial di sekitarnya.

2.2.4.2 Cakupan Sosial Kependudukan

Cakupan dari sosial kependudukan meliputi:

- 1) Jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, mobilitas, persebaran dan kepadatan penduduk.
- 2) Sosial, budaya, lingkungan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, politik dan keamanan.
- 3) Pertumbuhan penduduk (proyeksi penduduk) pada masa yang akan datang.

2.2.5 Tinjauan Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi

Berikut merupakan tinjauan berdasarkan aspek sosial ekonomi yang memuat pembangunan ekonomi, pengertian ekonomi, pertumbuhan ekonomi,

produk domestik regional bruto, pendapatan perkapita, usaha mikro kecil dan menengah, serta pengolahan dan pemasaran.

2.2.5.1 Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Jelas dapat dilihat dan didefinisikan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting.

2.2.5.2 Pengertian Ekonomi

Dalam berbagai konteks ekonomi, dikatakan berasal dari bahasa Yunani *oikos* atau *oik* dan *nomos* yang berarti aturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dan tentunya dalam arti dan perkembangannya kata rumah tangga tidak hanya merujuk pada keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Secara umum, ilmu ekonomi dapat digambarkan sebagai bidang studi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya material individu, komunitas, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebab ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam dan terus berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan/atau distribusi.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli;

- a) Adam Smith
Ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas.
- b) Lionel Robbins
Ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan tujuan dan sarana langka yang punya banyak alternatif.
- c) Aristoteles
Ekonomi ialah suatu cabang yang digunakan melalui dua jalan yaitu adanya kemungkinan (Nilai pemakaian dan nilai pertukaran).
- d) Abraham Maslow
Ekonomi merupakan ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup (ekonomi) manusia.
- e) Khursid Ahmad
Ekonomi sebagai sebuah usaha sistematis untuk memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya.

2.2.5.3 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011: 331), pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang

diproduksi oleh masyarakat menjadi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan penambahan barang dan jasa yang diproduksi sebenar-benarnya dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Karena pada dasarnya, aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses tersebut akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat (Basri, 2010).

2.2.5.4 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu cara untuk menilai pencapaian pembangunan secara keseluruhan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari perubahan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB merujuk pada nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit bisnis di wilayah tersebut, atau total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh ekonomi wilayah tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan performa ekonomi daerah yang lebih baik (Kurniawan, 2010). Pertumbuhan ekonomi daerah ini diukur melalui laju pertumbuhan PDRB pada harga konstan.

PDRB merupakan indikator penting untuk memahami kondisi ekonomi suatu daerah pada periode tertentu, baik berdasarkan harga saat ini maupun harga yang stabil. PDRB berdasarkan harga saat ini mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga saat itu, sementara PDRB berdasarkan harga stabil menunjukkan nilai tambah yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai patokan (Putri, 2020). PDRB memiliki dampak terhadap jumlah tenaga kerja yang bekerja, dengan asumsi bahwa peningkatan nilai PDRB akan mendorong peningkatan output atau penjualan di wilayah tersebut. Semakin besar output atau penjualan perusahaan, semakin besar permintaan akan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi guna mencapai peningkatan penjualan (Febriyanto, 2014). Pertumbuhan ekonomi seringkali diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah tercapai (Marsu, 2018).

2.2.5.5 Pendapatan Perkapita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari pendapatan perkapita adalah suatu pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk.

Hal tersebut merupakan cara yang umum digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemakmuran relatif antara berbagai negara atau wilayah, karena dapat memberikan gambaran tentang seberapa banyak pendapatan yang tersedia untuk setiap individu dalam suatu populasi. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi juga tingkat kemakmuran atau standar hidup yang diharapkan dalam suatu negara.

Menurut Sukirno (2004) mengatakan bahwa pendapatan perkapita adalah Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan per kapita dihitung sebesar berdasarkan pendapatan daerah dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai ukuran tingkat kemakmuran dan pembangunan suatu negara atau wilayah.

Menurut Adji, Wahyu (2007) mengatakan bahwa pendapatan per kapita memiliki beberapa keunggulan, seperti sebagai indikator kesejahteraan suatu negara, sebagai ukuran pertumbuhan kekayaan suatu negara, dan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Perbandingan kebijakan ekonomi dan tingkat kemakmuran antar negara. Pendapatan per kapita (PPK) suatu negara dapat dihitung dengan dua cara. Pertama, berdasarkan harga saat ini atau biasa disebut dengan nominal PPK. Kedua, dihitung berdasarkan harga konstan atau tetap, tahun acuan yang disebut PDB riil. Pendapatan per penduduk (PPK) dapat dihitung sebagai pendapatan nasional bruto dibagi penduduk. Namun untuk menghitung pendapatan per kapita suatu daerah yang berjumlah, dapat dihitung dengan membagi pendapatan daerah tersebut dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan semakin mempengaruhi pendapatan daerah atau negara itu sendiri. Berdasarkan konsep dan teori di atas, pendapatan per kapita dapat disimpulkan sebagai pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan per kapita dihitung sebesar berdasarkan pendapatan daerah dibagi jumlah penduduk. Dibawah ini konsep pendapatan per kapita untuk menghasilkan besaran nominal pendapatan per kapita. Bagilah pendapatan daerah atau nasional dengan jumlah penduduk di kabupaten/kota sehingga diperoleh total pendapatan per kapita kabupaten/kota.

PPK = Pendapatan Regional / Jumlah Penduduk

2.2.5.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain di semua sektor ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling-paling pajak Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling-paling pajak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

2.2.5.7 Pengolahan dan Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa, untuk menjaga kontinuitas bisnisnya. Ini karena pemasaran merupakan interaksi langsung perusahaan dengan konsumen, sehingga kegiatan ini dapat dipandang sebagai aktivitas manusia yang terjadi dalam konteks pasar.

- a) Menurut Maynard dan Beckham yang dikutip oleh Alma (2011) dalam buku Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, pemasaran meliputi aktivitas bisnis yang terlibat dalam aliran barang dan jasa dari produksi fisik hingga konsumsi.

- b) menurut Daryanto (2011), pemasaran merupakan sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan melakukan pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai satu sama lain.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka.

2.2.6 Tinjauan Berdasarkan Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

Berikut merupakan tinjauan berdasarkan aspek kelembagaan dan pembiayaan yang memuat pengertian kelembagaan, pengertian pembiayaan, pengertian UMKM, serta pengertian perdagangan dan jasa.

2.2.6.1 Pengertian Kelembagaan

Menurut Ruttan dan Hayami (1984), lembaga adalah lembaga yang membina atau menunjang koordinasi antar anggotanya dan saling mendorong dengan harapan agar setiap orang dapat bekerjasama atau berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan yang diinginkan. Kelompok atau organisasi yang saling membantu. Menurut Ostrom (1985-1986), institusi diartikan sebagai kebijakan yang digunakan oleh anggota sekelompok masyarakat yang berfungsi untuk mengelola hubungan yang saling mengikat atau saling bergantung.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan para ahli, terdapat beberapa faktor kelembagaan seperti:

- Lembaga yang menjadi landasan dalam mengkonstruksi perilaku sosial dalam masyarakat.
- Kode perilaku dalam masyarakat yang menggabungkan nilai-nilai tertentu dan diterima untuk mencapai tujuan bersama yang menciptakan interaksi terstruktur antar manusia.
- Regulasi dan peraturan/penegakan hukum.
- Aturan masyarakat yang mendorong semua koordinasi dan kerja sama dengan mendukung tindakan, hak, dan tanggung jawab para anggotanya.
- Kode Etik
- Pasar
- Kontrak
- Hak Milik
- Organisasi
- Insentif untuk Mengembangkan Perilaku

2.2.6.2 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dukungan keuangan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu, dan mekanismenya biasanya mencakup pemberi pinjaman, penyedia barang, aset, atau jasa tertentu, dan melibatkan tiga pihak: pihak yang menggunakan , aset, atau layanan. Menurut Kasmir (2008: 96), pembiayaan adalah pemberian uang atau surat yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau pengaturan antara suatu bank dengan pihak lain, yang mana pihak yang menerima pembiayaan itu mempunyai kewajiban untuk menyerahkannya dengan imbalan sebagian keuntungan untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Rivai dan Arifin (2010 : 681) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Kelembagaan yang akan dibahas disini yakni dinas Perdagangan dan Jasa Kota Palembang, Dinas Koperasi dan UMKM, serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Selain membahas kelembagaan pembahasan lain yang diangkat yaitu program kerja dan alur pembiayaan lembaga pemerintah dalam meningkatkan sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1.

2.2.6.3 Pengertian UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Menurut Inna Primiana seorang pakar ternama usaha mikro adalah adalah penggerak utama yang dapat membantu perekonomian, usaha mikro sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yakni: agraris, industri manufaktur, agribisnis dan sumber daya manusia.

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM diklasifikasikan menjadi 3 kategori :

1. Usaha Mikro :
 - Memiliki omzet paling banyak Rp 300 juta per tahun
 - Memiliki aset atau kekayaan paling bersih Rp 50 juta
 - Diusahakan oleh orang perorangan
2. Usaha Kecil :
 - Memiliki omzet lebih dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun
 - Memiliki aset atau kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta
 - Diusahakan oleh orang perorangan atau badan usaha

3. Usaha Menengah :

- Memiliki omzet lebih dari Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar per tahun
- Memiliki aset atau kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar
- Diusahakan oleh badan usaha

UMKM memiliki peran yang cukup penting terutama di Kota Palembang karena berkontribusi sebesar 60,7% terhadap PDB Kota Palembang pada tahun 2022, menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, hingga pelestarian budaya lokal. Untuk itu perlu adanya dukungan yang optimal dari Pemerintah untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas UMKM di Kota Palembang agar terus berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

2.2.6.4 Pengertian Perdagangan dan Jasa

Secara umum, usaha perdagangan dan jasa merupakan aktivitas ekonomi yang terlibat dalam transaksi jual beli barang atau pelayanan antara penjual dan pembeli. Barang yang diperdagangkan memiliki bentuk fisik yang dapat dipindahkan kepemilikannya oleh pembeli, sedangkan jasa hanya melibatkan pengalaman atau layanan yang diberikan tanpa melibatkan barang fisik.

Fokus utama dari jenis usaha ini adalah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dagangan atau layanan yang ditawarkan. Keuntungan yang diperoleh biasanya dialokasikan kembali sebagai modal usaha, biaya distribusi, dan biaya operasional guna menjaga kelangsungan usaha.

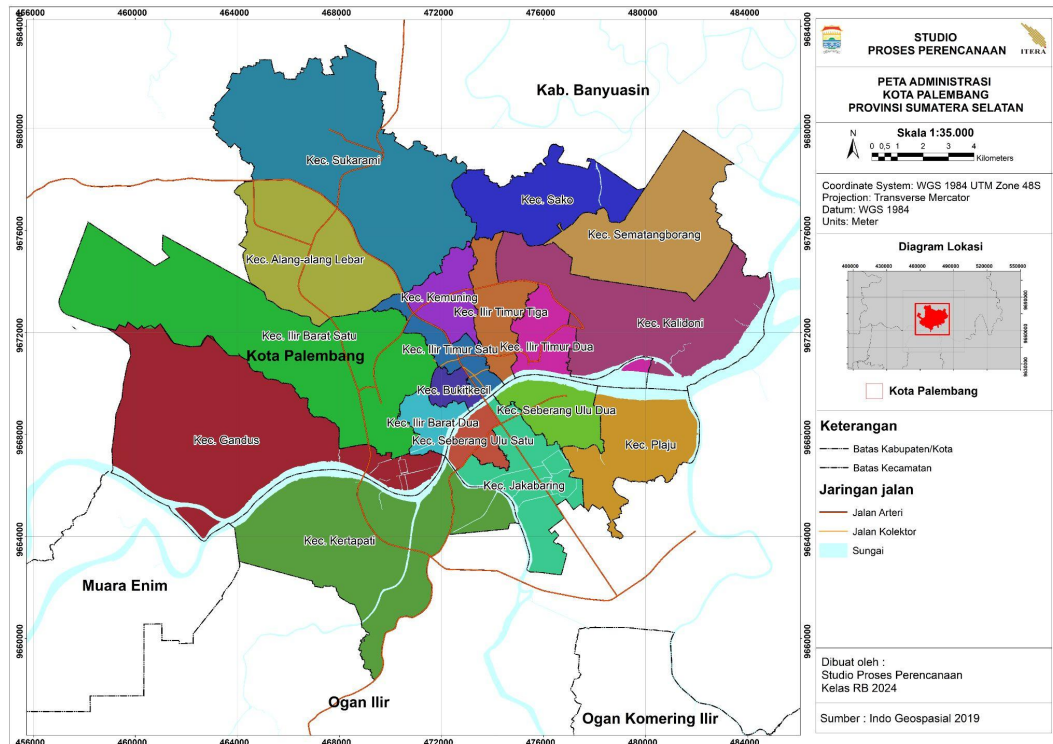
Dalam mengelola usaha perdagangan dan jasa, strategi yang kuat sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Sebagai seorang pengusaha, penting untuk memperhatikan peluang usaha yang ada.

Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama dari jenis usaha perdagangan dan jasa:

- Pendapatan utama diperoleh dari penjualan barang dagangan atau pelayanan jasa.
- Biaya utama meliputi harga pokok penjualan dan berbagai biaya operasional lainnya.
- Berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen.
- Dalam usaha perdagangan, tidak ada perbedaan antara barang yang dibeli dan dijual.
- Akuntansi dalam usaha perdagangan mencakup pencatatan akun persediaan barang dagang.
- Penjual dalam usaha perdagangan cenderung menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Palembang



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Palembang

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang merupakan kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah Kota Medan dan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Bandung, Medan serta menjadi kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai kota metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patungraya Agung atau Palembang Raya.

Kota Palembang menjadi kota tertua di Indonesia berdasarkan penemuan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat Kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi. Di barat, Kota Palembang dijuluki *Venice of the East* (Venesia dari Timur) dan Serambi Hadramaut. Kota ini mendapat julukan Serambi Hadramaut karena beberapa gelar Habaib yang ada disini tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia.

3.1.1 Kedudukan Wilayah

1. Kedudukan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Nasional

Provinsi Sumatera Selatan memiliki daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional yaitu Kota Palembang yang melayani daerahnya sendiri dan daerah sekitarnya. Memiliki Akses Pelabuhan Penyeberangan sebagai akses menuju Bangka Belitung. Sebagai Lumbung Energi Nasional khususnya melalui Pembangunan Ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri. Provinsi ini memiliki peran politik yang signifikan, dengan sejarah yang meliputi peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Sumatera Selatan juga memiliki populasi penduduk yang cukup besar, menjadi salah satu wilayah yang menampilkan citra menguatnya partai politik nasionalis. Dalam lima tahun mendatang, kebijakan reposisi diarahkan untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan, fasilitasi, integrasi, dan distribusi pembangunan, sehingga peran dan posisinya harus bergeser dari daerah penerima menjadi daerah penyumbang pada pencapaian nasional. Selain itu, Sumatera Selatan juga pernah menjadi salah satu negara bagian dalam negara federal di Indonesia, yang menunjukkan sejarah politik dan otonomi daerah yang relevan dalam konteks nasional.

2. Kedudukan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pulau Sumatera

Kedudukan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pulau Sumatera diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 Ayat (5) mengenai kedudukan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kedudukan strategis di bagian selatan Pulau Sumatera. Wilayahnya terbentang luas di sepanjang pantai barat Samudera Hindia, dan provinsi Sumatera Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan Indonesia. Populasi penduduk Sumatera Selatan terbanyak kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara.

Tahun 2022, jumlahnya mencapai 8.657.008 jiwa dengan batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- Sebelah Barat : Provinsi Bengkulu
- Sebelah Utara : Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan : Provinsi Lampung
- Sebelah Timur : Provinsi Bangka Belitung

Provinsi Sumatera Selatan menjadi sentral dalam menjembatani hubungan antara Sumatera dengan wilayah lainnya. Selain itu, posisi geografis Sumatera Selatan juga berpengaruh terhadap keragaman ekosistem dan sumber daya alam di Pulau Sumatera. Dengan sebagian wilayahnya berada di dataran rendah dan sepanjang pesisir, sehingga provinsi Sumatera Selatan menjadi area vital untuk aktivitas perekonomian, pertanian, dan perikanan serta Sumatera Selatan juga

memiliki peran politik yang signifikan, dengan sejarah yang meliputi peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Sumatera Selatan juga pernah menjadi salah satu negara bagian dalam negara federal di Indonesia, yang menunjukkan sejarah politik dan otonomi daerah yang relevan dalam konteks nasional. Dalam lima tahun mendatang, kebijakan reposisi diarahkan untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan, fasilitasi, integrasi, dan distribusi pembangunan, sehingga peran dan posisinya harus bergeser dari daerah penerima menjadi daerah penyumbang pada pencapaian nasional.

3. Kedudukan Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan

Merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini terletak di bagian tenggara Sumatera Selatan dan merupakan kota terbesar kedua di provinsi ini setelah Kota Prabumulih. Palembang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-14. Saat ini, Palembang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Selatan. Selain itu, Palembang juga memiliki potensi wisata yang menarik, seperti Masjid Agung Palembang, Benteng Kuto Besak, dan Sungai Musi yang mana berdasarkan RPJMN Sebagai kawasan metropolitan dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Berdasarkan Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang 2012-2032, Kota Palembang sebagai penyedia sarana dan fasilitas Kota meliputi rencana penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, peribadatan serta rekreasi dan olahraga.

4. Kedudukan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Ilir Timur I di Kota Palembang

Kedudukan Kec. Ilir Timur I terhadap Kota Palembang berdasarkan RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032 adalah :

- Terdapat 6 Kelurahan pada Kec. Ilir Timur 1 menjadi Pusat Pelayanan Kota Merdeka terdiri dari Kel. 13 Ilir, Kel. 14 Ilir, Kel. 15 Ilir, Kel. 16 Ilir, Kel. 17 Ilir, dan Kel. 18 Ilir, yang melayani wilayah seberang Ilir Palembang.
- Sub Pusat Pelayanan Kota, yang meliputi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Sei Pangeran, 20 Ilir D1, 20 Ilir DIII, 20 Ilir D IV dan Kepandean Baru yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perumahan dan perkantoran.
- Pada pusat pemerintahan kelurahan Kec. Ilir Timur 1 menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan kawasan yang melayani skala lingkungan di wilayah kota

Dapat dilihat pada Kecamatan Ilir Timur I yang mana pada kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Alang-Alang Lebar (sebelah timur) dan pada kecamatan Ilir Timur I memiliki potensi dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan mendukung visi pengembangan Palembang.

3.1.2 Geografi Wilayah Kota Palembang

Kota Palembang terletak antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Pada tahun 2007, Kota Palembang dibagi menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II, sehingga saat ini Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas wilayah Kota Palembang adalah 352,51 km². Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan, yaitu :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Ilir Barat II | 10. Ilir Timur I |
| 2. Gandus | 11. Kemuning |
| 3. Seberang Ulu I | 12. Ilir Timur II |
| 4. Kertapati | 13. Kalidoni |
| 5. Jakabaring | 14. Ilir Timur III |
| 6. Seberang Ulu II | 15. Sako |
| 7. Plaju | 16. Sematang Borang |
| 8. Ilir Barat I | 17. Sukarami |
| 9. Bukit Kecil | 18. Alang-Alang Lebar |

Secara administratif Kota Palembang berbatasan dengan

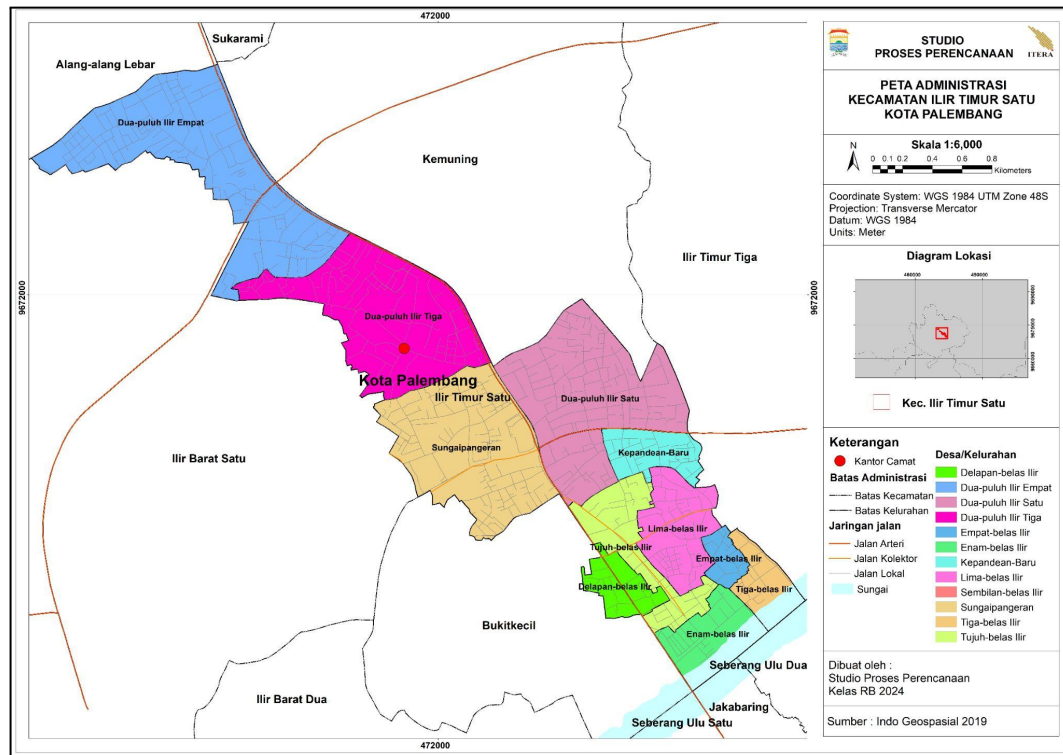
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

3.1.3 Jumlah Penduduk Kota Palembang

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 (September) jumlah penduduk Kota Palembang sebanyak 1.668.848 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 837.0317 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 831.817. Besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,63 persen yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Pada tahun 2022, penduduk Kota Palembang sebanyak 1.729.546 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 865.942 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 863.604 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100 persen yang berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Ilir Timur I



Gambar 3.2 Peta Administrasi Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Ilir Timur I merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kota Palembang dan menjadi salah satu wilayah pemerintahan administrasi yang semakin berkembang secara pesat dari berbagai sektor. Kelurahan ini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan karena Kantor Gubernur terletak di Kecamatan ini, tepatnya di Kelurahan Sungai Pangeran.

Letaknya yang strategis membuat perkembangan infrastruktur dan pengembangan semakin nampak di Kecamatan Ilir Timur I ini. Kecamatan ini juga merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak di Kota Palembang. Kecamatan Ilir Timur I yang terletak di tengah-tengah Kota Palembang ini berjarak 1 km dari pusat kota dan memiliki luas wilayah 6,39 km². Kecamatan Ilir Timur I terdiri dari 11 kelurahan, yaitu

1. Delapan Belas Ilir
2. Enam Belas Ilir
3. Tiga Belas Ilir
4. Empat Belas Ilir
5. Lima Belas Ilir
6. Tujuh Belas Ilir
7. Kepandean Baru
8. Dua Puluh Ilir Satu
9. Sungai Pangeran
10. Dua Puluh Ilir Tiga
11. Dua Puluh Ilir Empat

Secara administratif, Kecamatan Ilir Timur I berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemuning.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur III.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Musi dan Kecamatan Sebrang Ulu II.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat I.

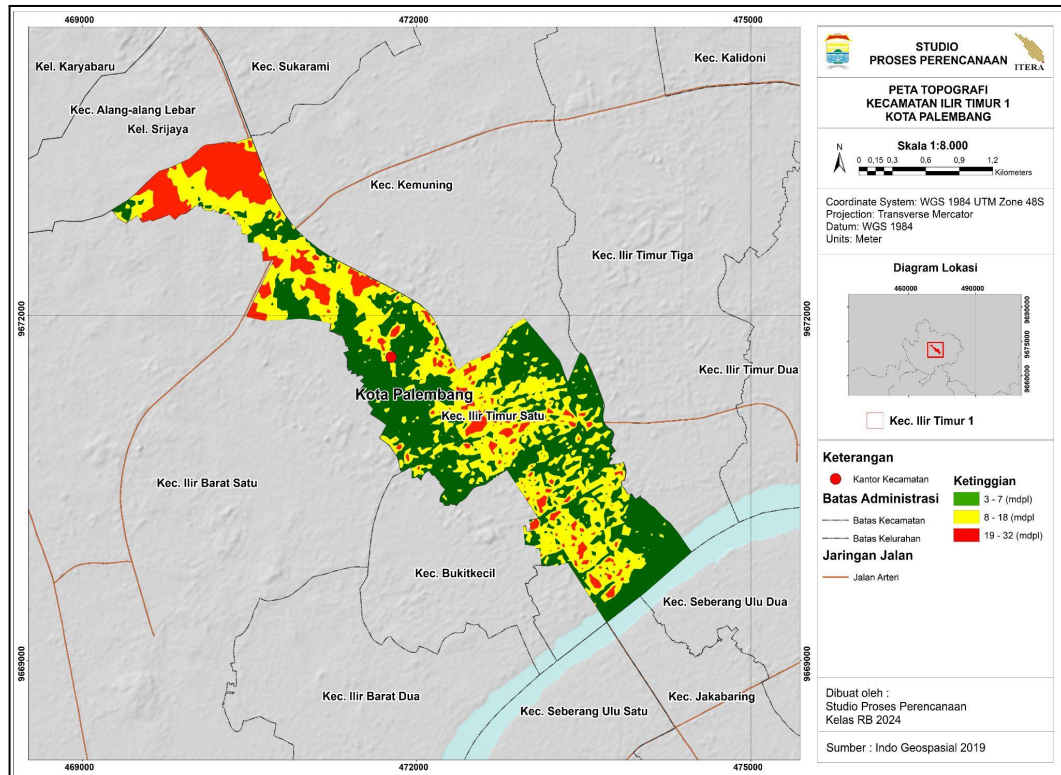
3.3 Gambaran Umum Aspek

Gambaran umum aspek berisi mengenai gambaran umum wilayah Kecamatan Ilir Timur I berdasarkan tinjauan dari berbagai aspek, yaitu aspek fisik lingkungan, infrastruktur dan pergerakan, spasial keruangan, sosial kependudukan, sosial ekonomi, serta kelembagaan dan pembiayaan.

3.3.1 Fisik Lingkungan

Aspek fisik lingkungan berdasarkan pengertiannya adalah analisis untuk mengenali karakteristik segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang tidak bernyawa. Misalnya air, suhu, udara, jenis tanah, dan bentuk fisik lainnya. Aspek ini juga dapat digunakan sebagai analisis dalam mengetahui sumber daya alam dan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.

3.3.1.1 Topografi

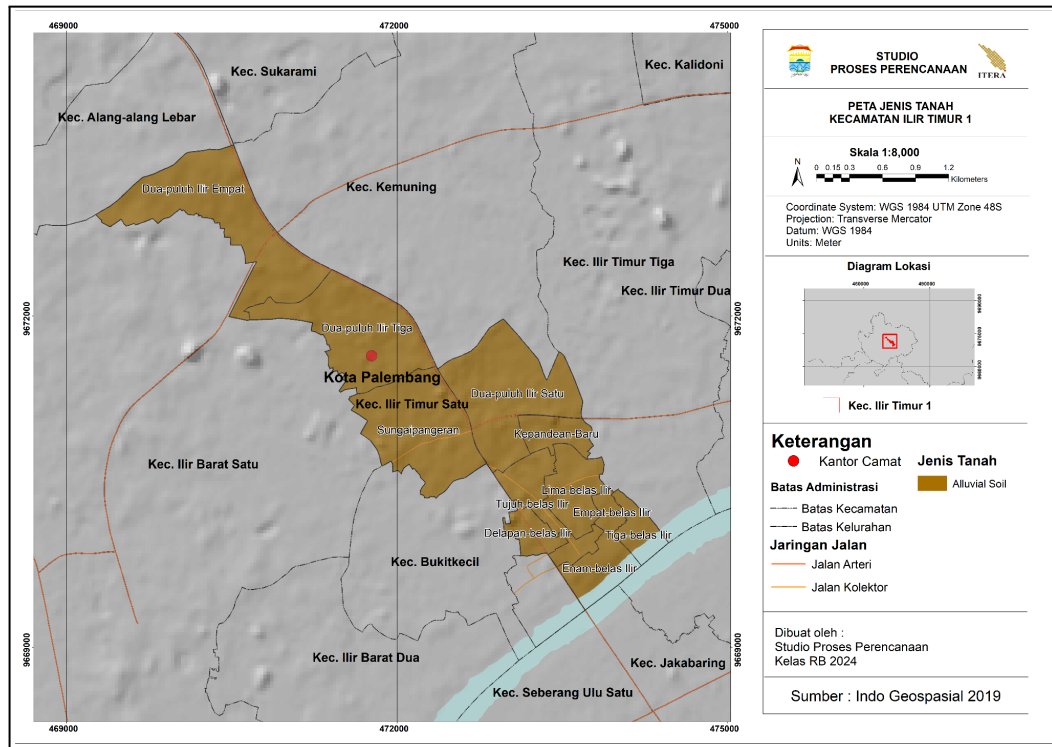


Gambar 3.3 Peta Topografi Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Topografi adalah deskripsi atau peta yang menunjukkan bentuk permukaan bumi dan fitur-fitur alam lainnya seperti, gunung, bukit, lembah, dataran, sungai dan danau. Kecamatan Ilir Timur 1 merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kota Palembang. Kecamatan Ilir Timur 1 memiliki ketinggian lahan yang didominasi angka 3-7 mdpl, dan 8-32 mdpl yang artinya merupakan jenis topografi berupa dataran rendah. Dari ketinggian tersebut kecamatan Alang-alang lebar memiliki tingkat kemiringan lereng yang tergolong datar dan landai yakni berada pada angka 0-8%.

3.3.1.2 Jenis Tanah

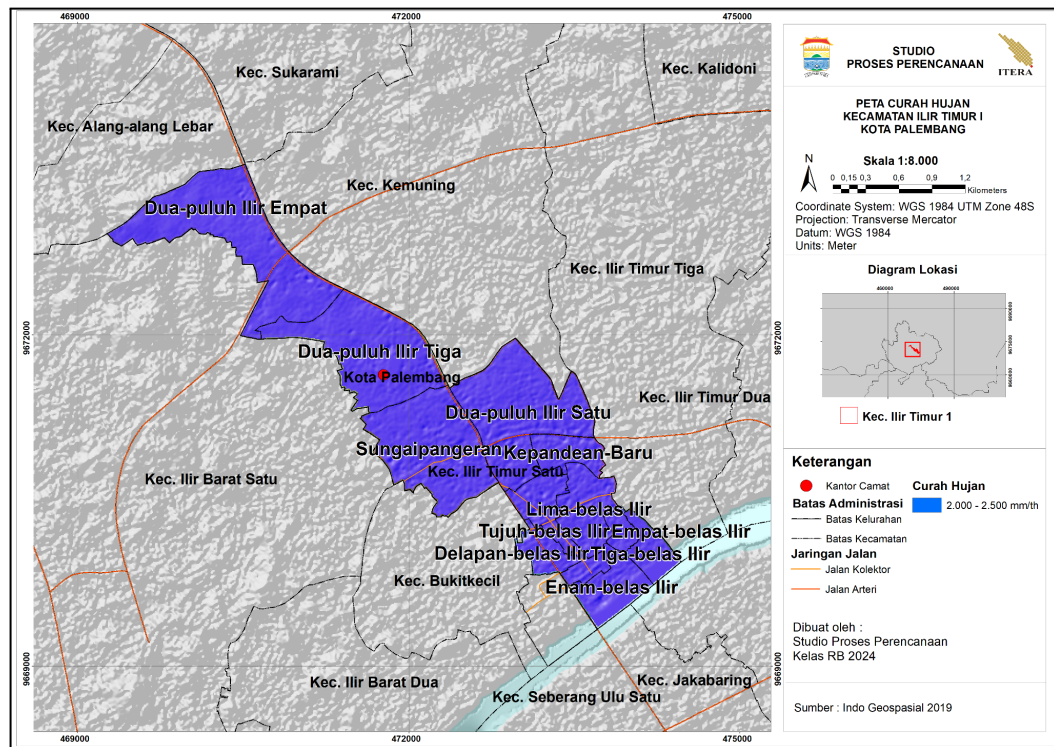


Gambar 3.4 Peta Jenis Tanah Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Jenis tanah adalah klasifikasi yang diberikan berdasarkan sifat fisik, kimia, dan biologisnya. Tanah dibedakan berdasarkan komponen-komponen yang membentuknya seperti, mineral, bahan organik, air dan udara serta proses-proses yang terjadi didalamnya. Kecamatan Ilir Timur 1 didominasi oleh satu jenis tanah yaitu Alluvial Soil dengan angka 100% hal ini disebabkan karena kecamatan Ilir Timur dekat dengan aliran sungai.

3.3.1.3 Curah Hujan



Gambar 3.5 Peta Curah Hujan Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

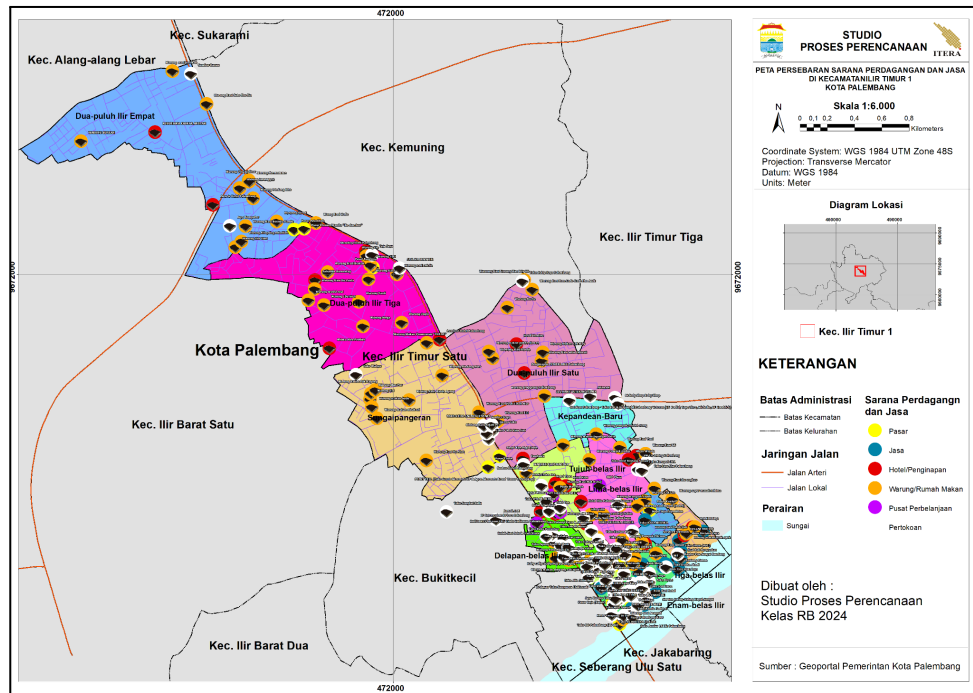
Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang jatuh dan terkumpul pada tempat yang memiliki bidang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan di kecamatan Ilir Timur 1 mencapai angka 2000-2500 mm/thn. Dengan kondisi fisik dan lingkungan tersebut, kecamatan Ilir Timur 1 berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

3.3.2 Infrastruktur dan Pergerakan

Infrastruktur di setiap wilayah merupakan aspek yang sangat penting, dikarenakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan infrastruktur yang menunjangnya. Pada aktivitas masyarakat dibutuhkan suatu pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang mendukung masyarakatnya untuk menjalankan aktivitas tersebut. Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas suatu kegiatan perekonomian, yang nantinya berpotensi dalam peningkatan kesejahteraan penduduknya.

3.3.2.1 Sarana

1. Sarana Perdagangan dan Jasa



Gambar 3.6 Peta Persebaran Sarana Perdagangan dan Jasa Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Menurut UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 terdapat 8 jenis sarana perdagangan berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi dan sarana perdagangan lainnya dan 12 jenis jasa yang dapat diperdagangkan adalah jasa bisnis yaitu jasa yang terkait usaha masyarakat, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup dan jasa keuangan, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa kesehatan dan sosial, jasa rekreasi kebudayaan dan olahraga, jasa pariwisata, jasa transportasi serta jasa lain-lain.

Di Ilir Timur 1 sendiri merupakan pusat perdagangan dan jasa, yang di dalamnya terdiri beberapa pusat perbelanjaan, pasar, dan jasa, serta lebih banyak tersedia warung makan, hotel, dan pertokoan.

2. Sarana TPS dan TPA

Dalam Peraturan Menteri PU No.3/2013, dijelaskan definisi TPS, TPA, serta TPS3R. TPS merupakan singkatan dari Tempat Penampungan Sementara, TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan tempat pengolahan sampah terpadu. TPS ini nantinya harus memenuhi beberapa kriteria teknis, di antaranya tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis, serta jenis penampungan

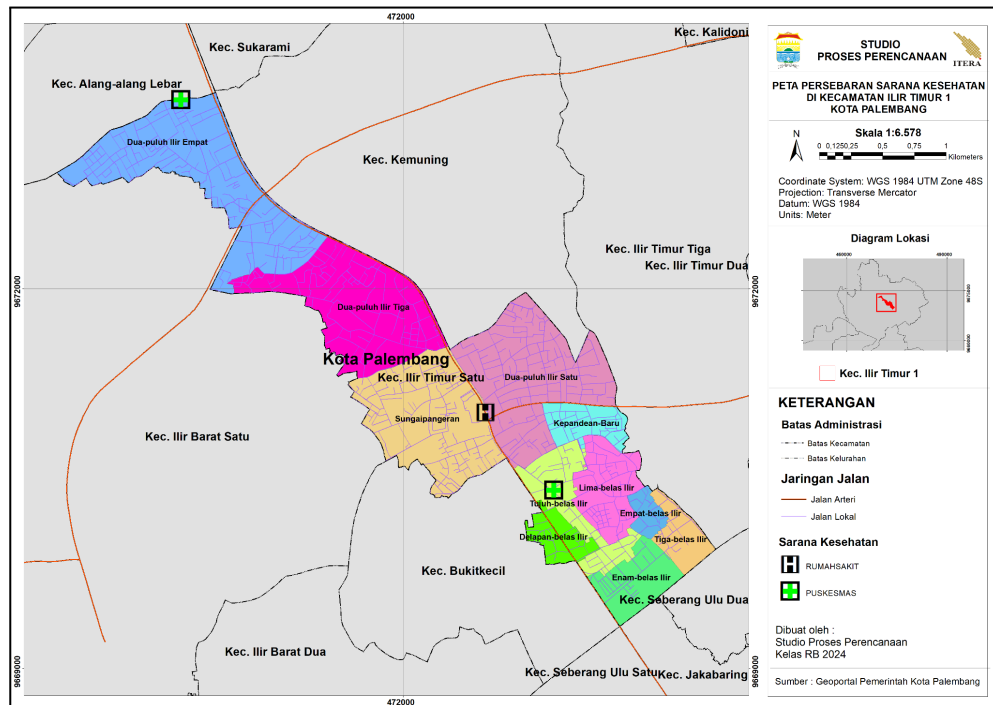
yang bersifat sementara. Artinya, akan lebih baik apabila masyarakat sudah melakukan pilah sampah sebelum sampah tersebut dikirim ke TPS.

Sedangkan Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang selanjutnya disingkat menjadi TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah spesifik rumah tangga dan B3, serta pengumpulan sampah residu untuk nantinya diangkut ke TPA.

Terakhir, Tempat Pemrosesan Akhir atau biasa disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu.

Di Ilir Timur tidak ditemukan adanya titik lokasi TPS serta TPA dari berbagai sumber dan sulit untuk mengidentifikasi melalui *google earth*.

3. Sarana Kesehatan



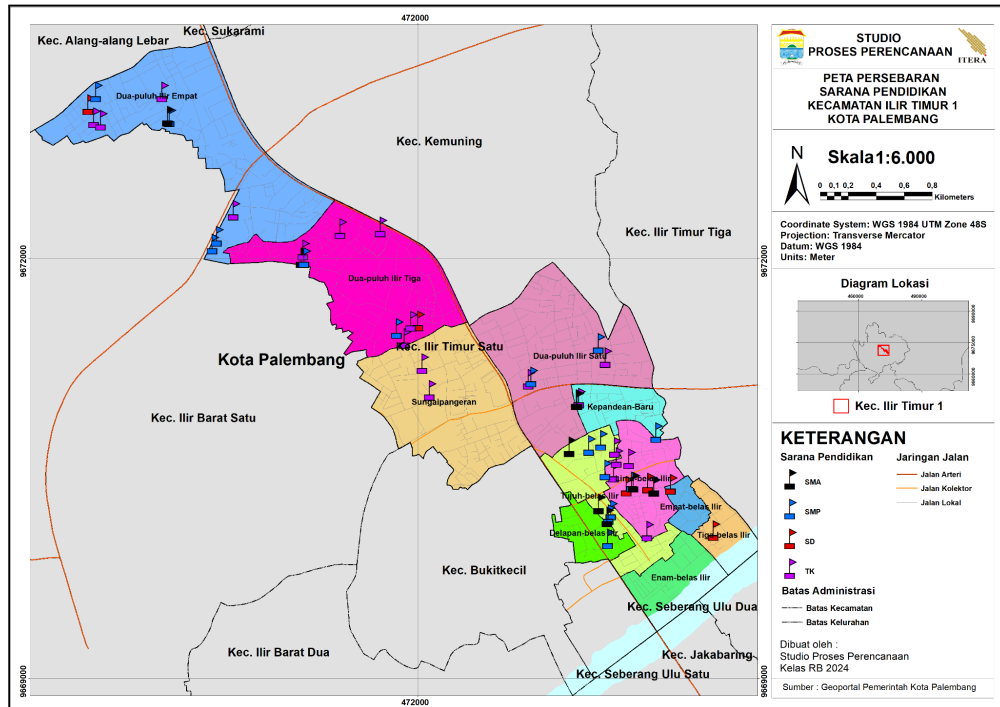
Gambar 3.7 Peta Persebaran Sarana Kesehatan Kecamatan Ilir Timur 1

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Pasal 1 ayat 5, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pada Kecamatan Ilir Timur 1 memiliki fasilitas kesehatan berupa

Rumah Sakit sejumlah 3, Puskesmas sejumlah 6, Poliklinik sejumlah 4, dan Apotek sejumlah 8.

4. Sarana Pendidikan



Gambar 3.8 Peta Persebaran Sarana Pendidikan Kecamatan Ilir Timur I

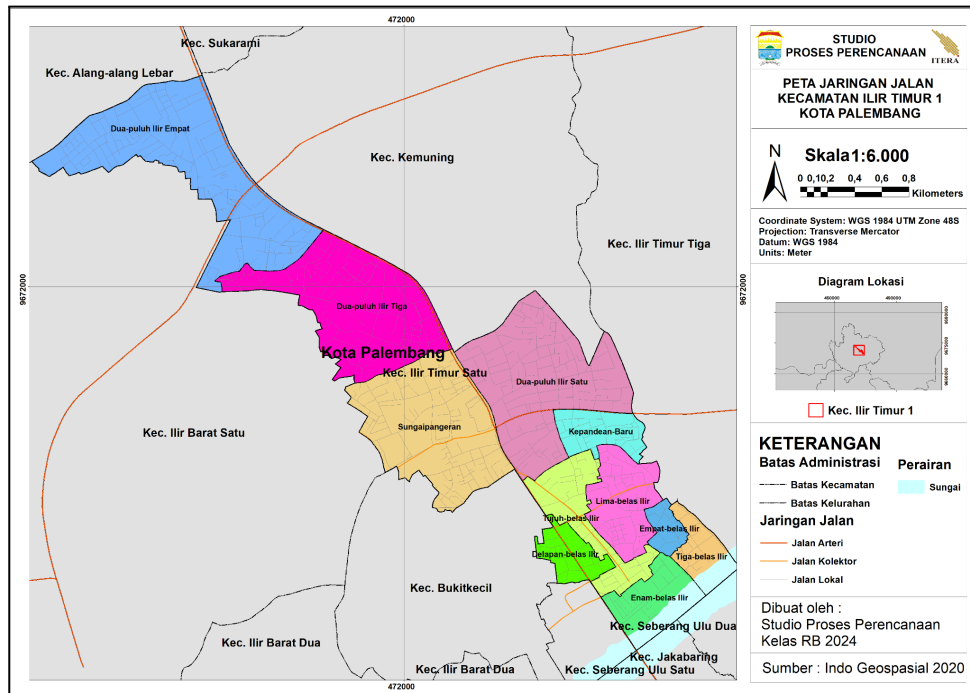
Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Di Ilir Timur 1 terdapat 16 TK, 5 SD, 15 SMP, dan 7 SMA. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang terbaru.

3.3.2.2 Prasarana

1. Jaringan Jalan



Gambar 3.9 Peta Jaringan Jalan Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pada Bab I Pasal 1 ayat 18, Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis; Kecamatan Ilir Timur 1 terdapat jaringan jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Lokal. Dimana jalan Arteri menjadi penghubung antara 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Ilir Timur 1. Sementara Jalan Kolektor menjadi penghubung antara Kelurahan Sungai Pangeran, Lima belas Ilir dan Tujuh belas Ilir.

2. Jaringan Transportasi

Infrastruktur Transportasi merupakan sarana dari sistem yang memindahkan orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain, jaringan transportasi meliputi jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang dikelompokkan antara lain menurut hirarki, wilayah, kelas dan sifat pelayanannya. Selain itu Jaringan Transportasi Jalan meliputi sebagai berikut:

a. Jaringan Prasarana

Jaringan prasarana transportasi jalan terdiri dari simpul yang berwujud terminal penumpang dan terminal barang dan ruang lalu lintas.

b. Jaringan Pelayanan

Pelayanan angkutan dengan kendaraan umum meliputi pelayanan angkutan orang dan pelayanan angkutan barang. Pelayanan angkutan orang dapat dikelompokkan menurut wilayah pelayanan dan operasi pelayanannya. Menurut wilayah pelayanannya, angkutan penumpang dengan kendaraan umum terdiri atas angkutan antarkota, angkutan kota, angkutan pedesaan, dan angkutan lintas negara. Menurut operasi pelayanannya, angkutan penumpang dengan kendaraan umum tersebut dapat dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur dan tidak dalam trayek.

c. Pengendalian Akses

Upaya mengendalikan akses yaitu:

1. Akses langsung ke jalan harus dibatasi pada jalan jalan baru, hanya dapat diijinkan bila memang akses tersebut tidak dapat dihindari.
2. Akses jalan kolektor masuk ke jalan arteri arus dibatasi dan lebih diarahkan pada simpang.
3. Akses tidak diperkenankan pada daerah yang rawan kecelakaan seperti lokasi yang jarak pandangnya terganggu atau di persimpangan.

d. Tata Guna Lahan Pengelompokkan Aktivitas

Tata guna lahan berubah secara terus menerus, oleh karena itu perlu dikendalikan secara ketat agar dapat diikuti dengan perencanaan lalu lintasnya. Prinsip yang dikembangkan dalam perencanaan tata guna lahan yang harus ditaati adalah :

1. Mengembangkan dan menerapkan rencana wilayah untuk memisahkan penggunaan lahan yang bertentangan dan mengendalikan lalu lintas yang dibangkitkan
2. Peraturan perencanaan yang kuat untuk mempengaruhi lokasi pembangunan kawasan baru dan pengendalian akses serta parkirnya
3. Tata guna lahan harus direncanakan sedemikian dengan sasaran agar perjalanan minimal dan aksesibilitas terhadap angkutan umum maksimal
4. Kawasan pemukiman harus dipisah dari kawasan industri ataupun kawasan niaga utama.

e. Sistem Jaringan Trayek

Perkembangan angkutan penumpang muncul karena perkembangan penyebaran penduduk, industri, pertanian, dan pertambangan yang memerlukan angkutan penumpang ke berbagai penjuru. Dasar penetapan jaringan trayek adalah:

- 1) Kebutuhan angkutan
- 2) Kelas jalan yang sama atau yang lebih tinggi
- 3) Tipe terminal yang sama atau yang lebih tinggi
- 4) Tingkat pelayanan jalan

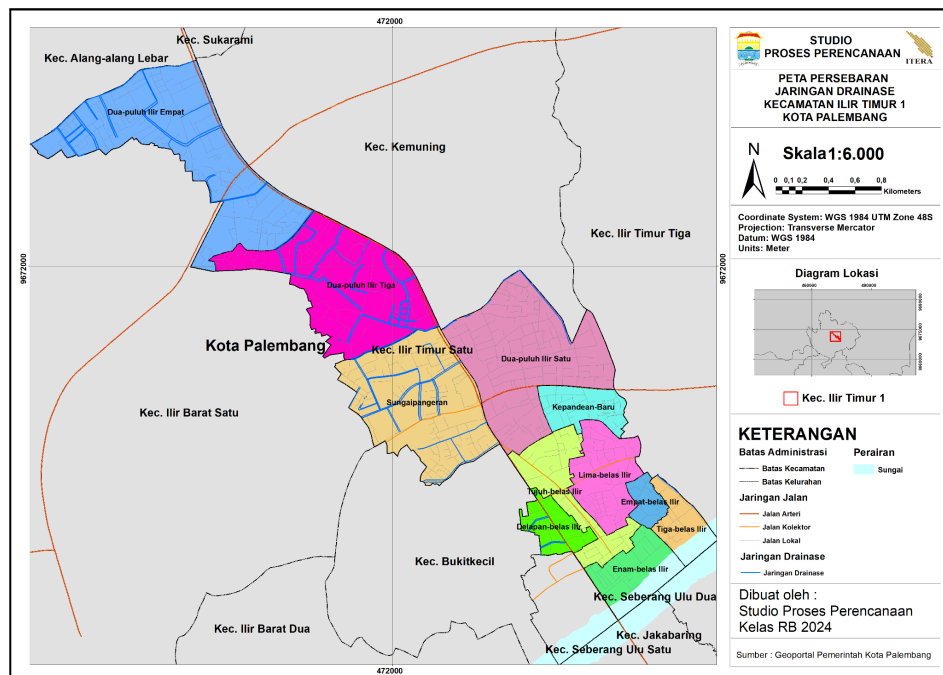
- 5) Jenis pelayanan angkutan
- 6) Rencana umum tata ruang
- 7) Kelestarian lingkungan
- 8) Sistem Jaringan Lintas

Perkembangan angkutan barang muncul karena perkembangan industri, pertanian, dan pertambangan yang memerlukan pasokan bahan baku dan peralatan serta distribusi produknya ke pusat-pusat pemasaran yang memerlukan jasa transportasi barang. Bentuk pelayanan yang ada dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan parkir kendaraan barang
- 2) Pemindahan barang antar kendaraan barang
- 3) Pergudangan
- 4) Konsolidasi pengiriman barang
- 5) Penjualan barang (grosir)
- 6) Pengepakan barang
- 7) Pengolahan barang

Kecamatan Ilir Timur 1 memiliki Halte Bus/BRT sejumlah 19 unit. Terdapat pula terminal irigasi yang terletak di bawah jembatan Musi 16, 16 Ilir.

3. Jaringan Drainase



Gambar 3.10 Peta Jaringan Drainase Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perkotaan drainase merupakan salah satu prasarana pendukung jalan. Yang

dimana di Kecamatan Ilir timur 1 sudah terdapat drainase yang terjaring pada kelurahan Dua Puluh Ilir Empat, Dua Puluh Ilir Tiga, Sungai Pangeran dan di perbatasan kelurahan Dua Puluh Ilir Satu dengan Kecamatan Kemuning. Sementara pada kelurahan Dua Puluh Ilir Satu, Kepandean Baru, Tujuh Belas Ilir, Lima Belas Ilir, Delapan Belas Ilir, Empat Belas Ilir, Tiga Belas Ilir, Enam Belas Ilir belum terdapat jaringan drainase.

3.3.2.3 Utilitas

1. Jaringan Listrik

Undang-undang nomor 30 tahun 2009 merupakan UU tentang Ketenagalistrikan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

A. Sumber Tenaga Listrik

Tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu bangunan dapat diperoleh dari tiga macam sumber tenaga, yaitu:

a. PLN (Perusahaan Listrik Negara)

Aliran ini berasal dari jaringan kota yang dikelola oleh pemerintah, karenanya dalam distribusi wattnya sangat terbatas pada pemakaian maksimal yang diijinkan.

b. Generator Set (GENSET)

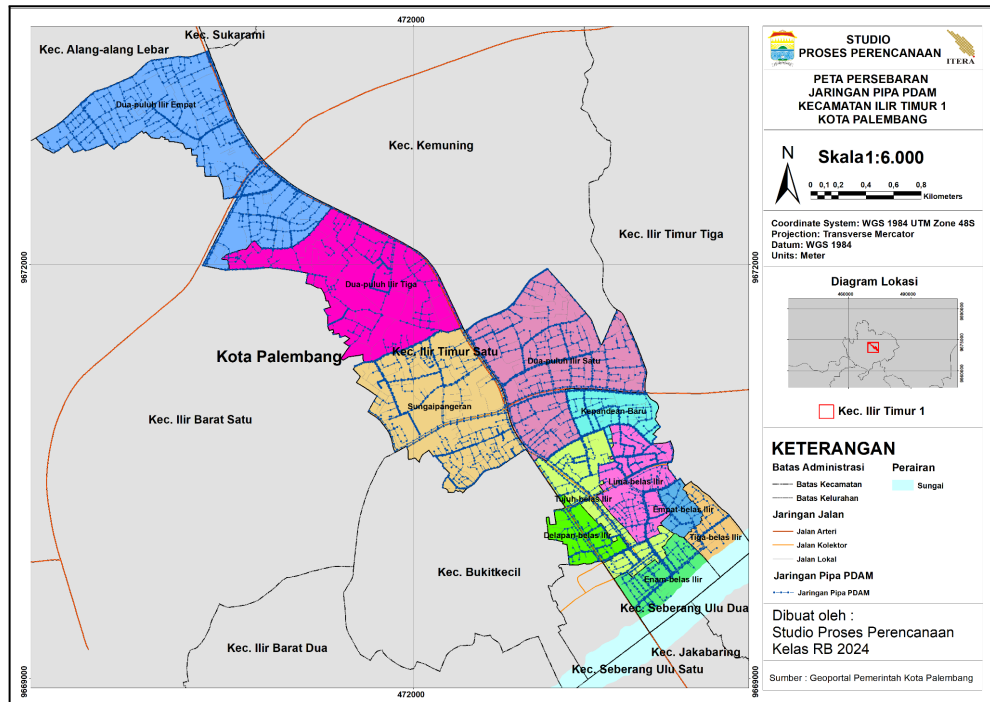
Generator merupakan alat yang mengubah gerakan mekanis menjadi listrik melalui proses kemagnetan. Sumber tenaga ini dikelola oleh pemilik bangunan dan merupakan fasilitas bangunan.

c. Baterai (Accumulator)

Baterai sering digunakan untuk mensuplai kebutuhan tenaga listrik dalam keadaan darurat (emergency) yang sifatnya terbatas, terutama untuk memenuhi kebutuhan penerangan. Beberapa unit ditempatkan pada individual cabinet atau pada rak untuk instalasi yang lebih besar dan selalu dilengkapi dengan peralatan automatic charging.

Pada Kecamatan Ilir Timur I masyarakat seluruhnya memakai sumber listrik dari PLN.

2. Jaringan Pipa PDAM



Gambar 3.11 Peta Jaringan Pipa PDAM Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1 Ayat 20, Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung; Salah satu institusi pengelola Sumber Daya Air adalah PDAM. Pada Kecamatan Ilir Timur 1 memiliki persebaran Pipa PDAM yang merata pada seluruh kelurahannya.

3. Jaringan Telekomunikasi

Menurut Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999 Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi meliputi:

1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
3. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

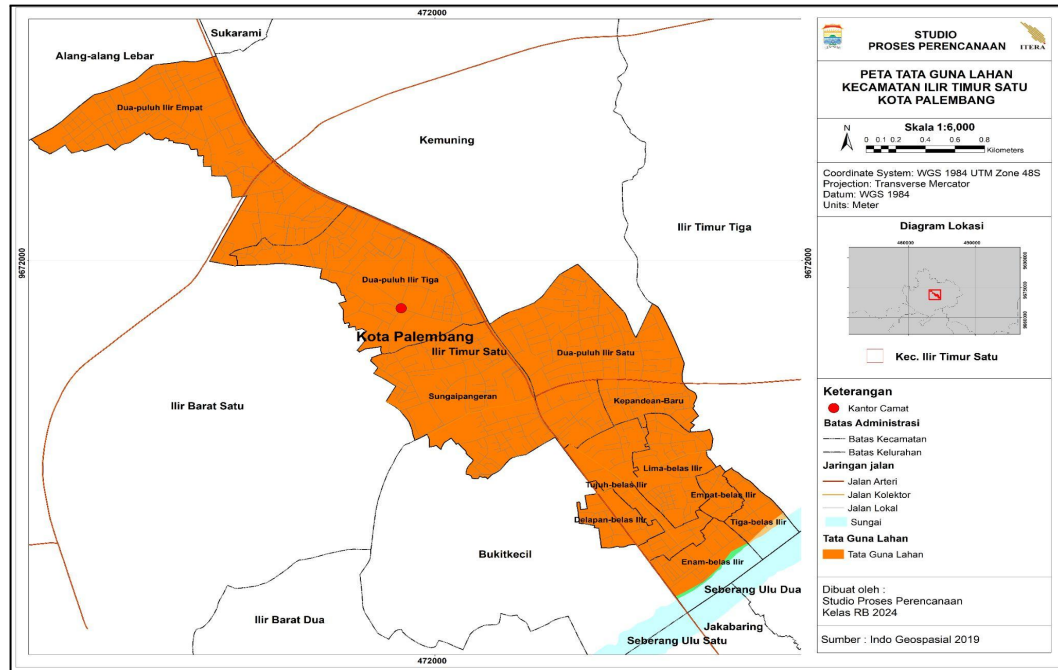
Sesuai yang tertuang dalam ketentuan umum pasal 7 bab 4, dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara harus memperhatikan kepentingan dan keamanan negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan peran serta masyarakat. Di Ilir Timur 1 tidak dapat diketahui jumlah data menara telekomunikasi yang terdapat disana.

3.3.3 Spasial Keruangan

Aspek Spasial Keruangan membahas terkait struktur ruang dan pola ruang pada peruntukannya pada suatu wilayah. Hal ini mencakup pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta struktur ruang yang meliputi sistem pusat pelayanan kota dan sistem jaringan prasarana kota juga perkembangannya.

Menurut Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, sebagian Kecamatan Ilir Timur I berfungsi sebagai PPK Merdeka yaitu Kelurahan 13 Ilir, Kelurahan 14 Ilir, Kelurahan 15 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 17 Ilir, Kelurahan 18 Ilir dengan fungsi utama melayani seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah Seberang Ilir Palembang. Sedangkan sebagian lainnya Kecamatan Ilir Timur I sebagai Sub-PPK (Pusat Pelayanan Kota) yaitu 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Sei Pangeran, Kelurahan 20 Ilir D1, Kelurahan 20 Ilir D III, Kelurahan 20 Ilir D IV dan Kelurahan Kepandean Baru dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perumahan dan perkantoran. Dalam mewujudkan tujuan di atas maka diperlukan observasi serta analisis Tata Guna Lahan, Tutupan Lahan, Jaringan serta Peruntukan Jalan sehingga Kecamatan Alang-Alang Lebar memiliki pola ruang dan struktur ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

3.3.3.1 Tata Guna Lahan

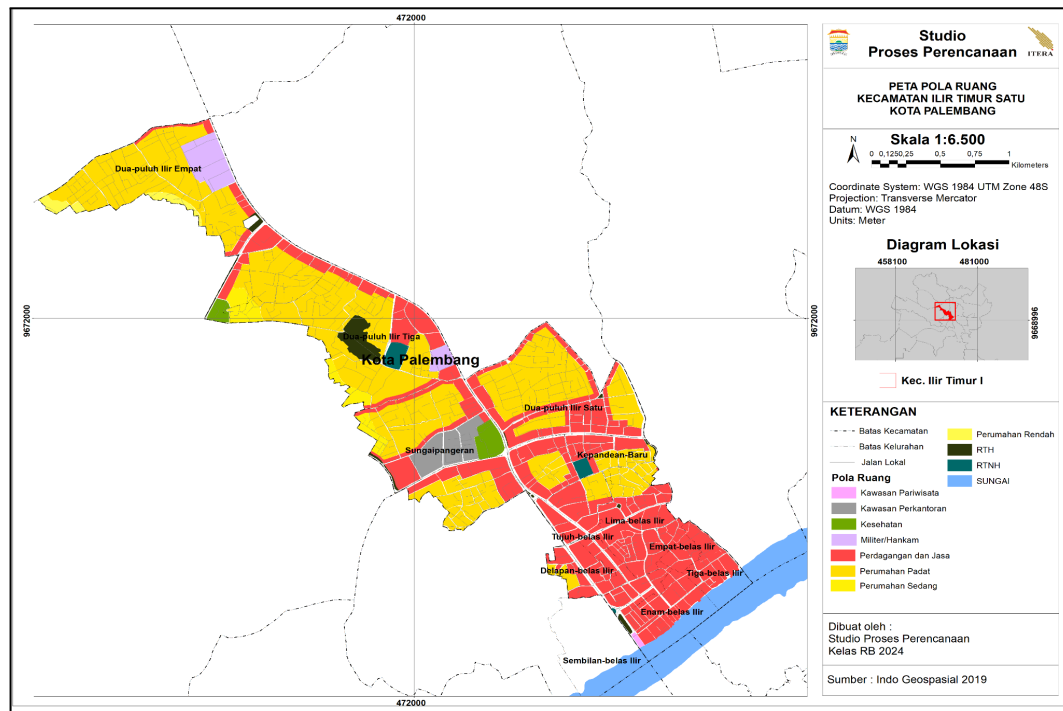


Gambar 3.12 Peta Tata Guna Lahan Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, Kecamatan Ilir Timur I dalam pemanfaatan lahannya digunakan sebagai lahan pemukiman, sehingga dari Peta Guna Lahan terlihat bahwa sebagian besar penggunaan lahan di Kecamatan Ilir Timur I ialah Kawasan Pemukiman.

3.3.3.2 Pola Ruang



Gambar 3.13 Peta Pola Ruang Kecamatan Ilir Timur I

Sumber : Hasil Pengolahan Arcgis Studio Proses Perencanaan RB

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, bahwa rencana pola ruang Kecamatan Ilir Timur I terbagi menjadi dua yaitu kawasan peruntukan perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa. Sehingga dapat dilihat pada Peta Pola Ruang Kecamatan Ilir Timur I sebagian besar didominasi oleh perumahan berkepadatan tinggi dan kawasan perdagangan dan jasa.

3.3.3.3 Jalan

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 Pasal 17 yang memuat terkait Jaringan Jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal/lingkungan. Di Kecamatan Ilir Timur I terdapat 3 fungsi jalan diantaranya:

1. Jalan Arteri

Menurut peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 Pasal 17, standar minimum lebar badan Jalan Arteri sebesar 11 meter.

2. Jalan Kolektor

Menurut peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 Pasal 17, standar minimum lebar badan Jalan Kolektor sebesar 9 meter.

3. Jalan Lokal/Lingkungan

Menurut peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 Pasal 17, standar minimum lebar badan Jalan Lokal/Lingkungan sebesar 7,5 meter. Dari hasil pengukuran yang kami lakukan menggunakan aplikasi *Google Maps* didapati lebar rata-rata jalan lokal/lingkungan di Kecamatan Ilir Timur I hanya sebesar 2,19 meter - 6,43 meter, yang berarti jauh di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Selain itu, kami menemukan bahwa tidak ada satu pun dari jalan lingkungan tersebut yang memenuhi standar lebar badan jalan lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.

3.3.4. Sosial dan Kependudukan

Kecamatan Ilir Timur I merupakan kecamatan dengan luas daerah yang paling kecil setelah kecamatan Ilir Barat II dibandingkan dengan luas kecamatan lain di kota Palembang. Akan tetapi, kecamatan Ilir Timur I memiliki tingkat kepadatan penduduk dengan jumlah paling besar dari seluruh kecamatan yang ada di kota Palembang yang dimana mencapai 10.987 jiwa per km².

Jumlah agama yang ada di Kecamatan Ilir Timur Satu meliputi 5 agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Pada tahun 2022 sebagian besar penduduk di Kecamatan Ilir Timur Satu beragama Islam. Seiring dengan banyaknya umat Islam di Kecamatan Ilir Timur Satu, tempat ibadah pun didominasi oleh tempat peribadatan agama Islam. Namun, jumlah pemeluk agama Budha yang mayoritas penganutnya adalah masyarakat Tionghoa di Kota Palembang terbesar berada di Kecamatan Ilir timur I. Seiring berjalannya waktu semakin banyak masyarakat Tionghoa yang menikah dengan masyarakat asli, sehingga mereka memutuskan untuk pindah agama. Meskipun masyarakat tionghoa telah berakulturasi budaya, mereka tetap memegang kukuh tradisinya. Selain itu, di Ilir Timur I juga terdapat kampung arab yang mana sampai saat ini masih mempertahankan tradisi adat seperti budaya tari tradisional dan makan lesehan bersama keluarga besar.

3.3.5 Sosial Ekonomi

Secara ekonomi, Palembang dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Sumatera bagian Selatan. Kota ini juga terkenal dengan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif, serta memiliki sektor pariwisata yang berkembang

pesat, terutama melalui wisata sejarah dan kuliner. Namun, seperti kota-kota besar lainnya, Palembang juga menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan sosial dan infrastruktur.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I-2023 mencapai Rp 151,14 triliun dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku, dan Rp 86,63 triliun berdasarkan harga konstan tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen (q-to-q) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menjadi sektor yang paling mengalami kontraksi, mencapai 13,06 persen. Di sisi Pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) juga mengalami kontraksi signifikan sebesar 47,82 persen.

Meskipun demikian, pada tingkat tahunan, ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 5,11 persen pada triwulan I-2023. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 13,35 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri, mencapai 38,27 persen. Penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai 5,03 persen pada triwulan I-2023, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,01 persen, menurut data yang dicatat oleh BPS.

Sumber pertumbuhan PDRB Kota Palembang berasal dari sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh signifikan sebesar 13,14 %, diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 7,89 %, perdagangan besar, eceran, dan reparasi sebesar 7,60 %. Sektor ekonomi lainnya yang juga tumbuh yaitu sektor transportasi dan pergudangan 7,48 %, sektor informasi dan komunikasi 6,35 %. Sektor industri pengolahan dan pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh, masing-masing sebesar 3,69 % dan 2,15 % (BPS, 2023).

3.3.6 Kelembagaan dan Pembiayaan

Kelembagaan merupakan aturan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau kelompok orang yang memungkinkan anggotanya bekerja sama dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, kelembagaan didefinisikan sebagai aturan dan peraturan yang digunakan oleh anggota kelompok untuk mengatur hubungan yang saling bergantung atau ikatan. Penataan institusi dapat ditentukan oleh beberapa elemen aturan operasional yang mengatur pemanfaatan sumber daya; aturan kolektif yang menentukan penegakkan hukum atau aturan itu sendiri; dan perubahan aturan operasional dan hubungan kewenangan antara organisasi.

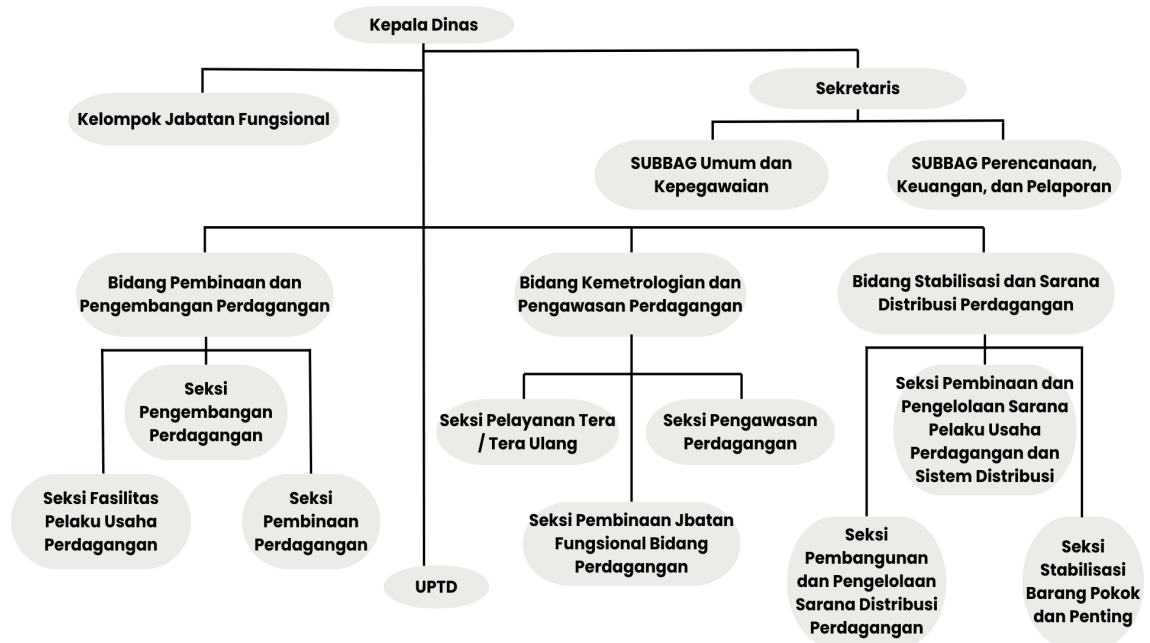
Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Kecamatan Ilir Timur 1 memiliki sektor perdagangan dan jasa yang berpotensi meningkatkan perekonomian di Kecamatan Ilir Timur 1. Kelembagaan yang akan dibahas yaitu struktur dan program kerja kelembagaan dan pembiayaan dalam meningkatkan sektor perdagangan dan jasa yang berkaitan dengan core isu aspek kelembagaan dan pembiayaan yaitu mengangkat sektor perdagangan dan jasa. Selain membahas struktur dan program kerja lembaga perdagangan dan jasa yang ada, ada bahasan lain yang diangkat yaitu pembiayaan atau modal yang dikeluarkan oleh pusat atau lembaga untuk meningkatkan sektor perdagangan dan jasa.

3.3.6.1 Dinas Perdagangan dan Jasa

Dinas Perdagangan Kota Palembang merupakan pelaksana urusan pemerintah dalam bidang Perdagangan. Pembentukan Dinas Perdagangan Kota Palembang berdasarkan pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. System kelembagaan Dinas Perdagangan Kota Palembang terdiri dari beberapa peraturan dan pedoman yang mengatur tata kerja dan pengelolaan bidang perdagangan di Kota Palembang. Berikut ini beberapa peraturan yang mengatur sistem kelembagaan Dinas Perdagangan Kota Palembang:

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Palembang.
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2013-2023.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4. Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Struktur Kepemimpinan Dinas Perdagangan Kota Palembang

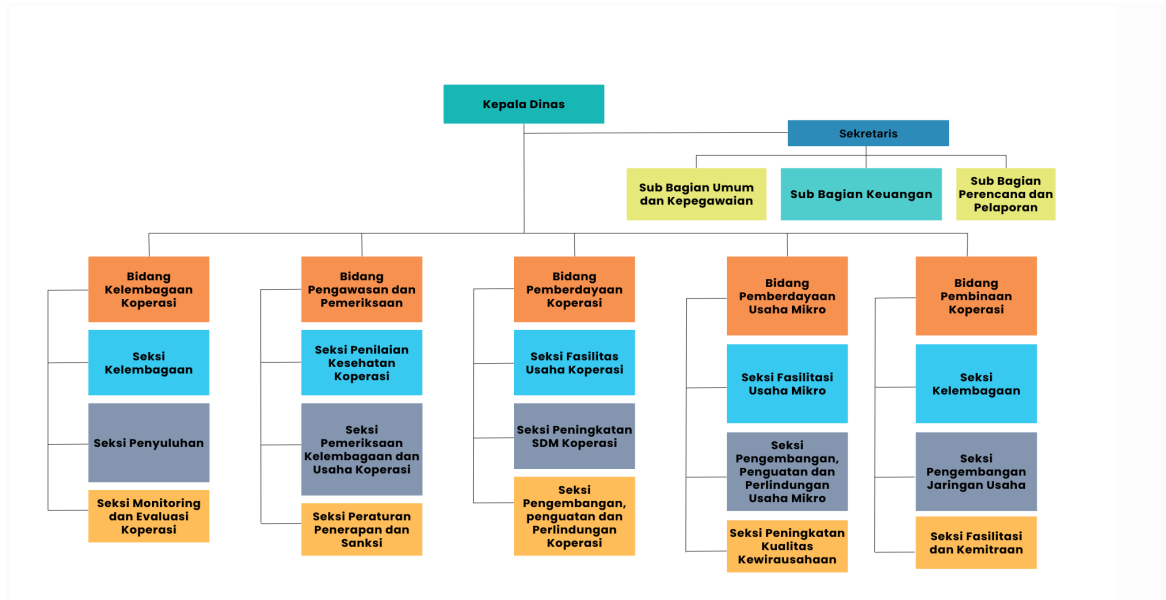


Sumber: Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Palembang Tahun 2024-2026

3.3.6.2 Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang. Sistem Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang terdiri dari program pembinaan yang didukung oleh program bantuan kredit tanpa agunan dan tanpa bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang.

Struktur Kepemimpinan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang



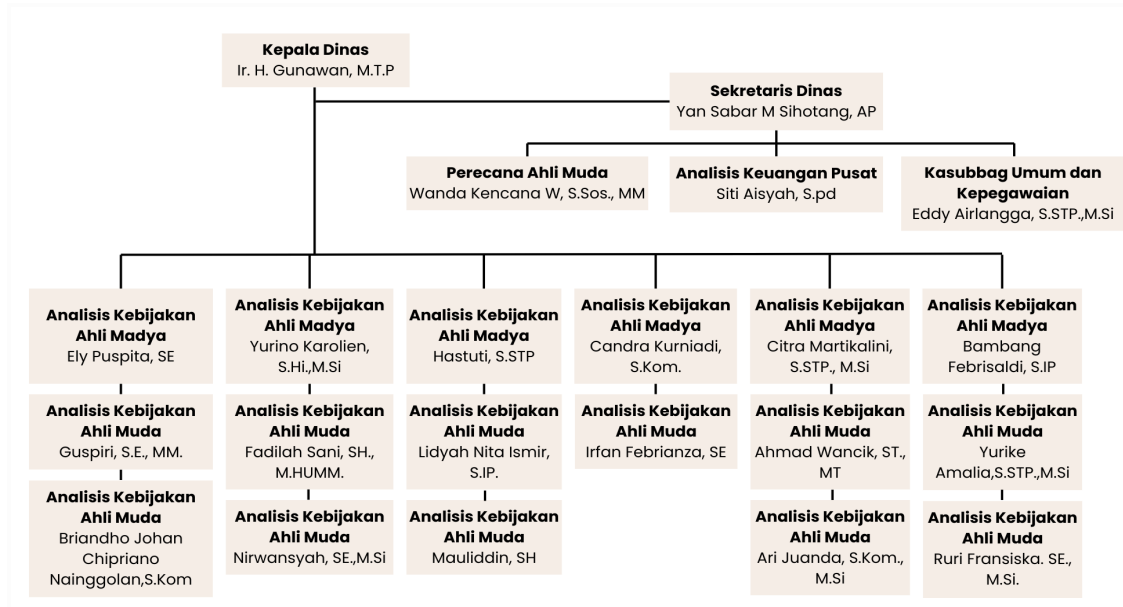
Sumber: Pemerintah Kota Palembang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang

3.3.6.3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Sebagai Lembaga yang menyelenggarakan administrasi perijinan secara terpadu di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Sistem kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang terdiri dari beberapa bidang yang masing-masing bidangnya membawahi tugas dan fungsi yang terpisah.

Struktur Kepemimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Matriks Data

Pada penelitian mengenai “Analisis Perkembangan Sektor Perdagangan dan Jasa guna Meningkatkan Perekonomian Wilayah Kecamatan Ilir Timur I” terdapat dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, kuesioner, ataupun observasi yang dilakukan di wilayah studi yaitu Kecamatan Alang-Alang Lebar. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai instansi yang menyediakan kebutuhan data dari keenam aspek perencanaan, yakni Aspek Fisik dan Lingkungan, Aspek Infrastruktur, Aspek Spasial dan Keruangan, Aspek Sosial dan Kependudukan, Aspek Sosial Ekonomi, dan Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan dalam bentuk dokumen yang berisi data dengan tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aspek.

4.2 Identifikasi Kebutuhan Data

Identifikasi kebutuhan data merupakan proses mencari, mengumpulkan, meneliti, dan mencatat data dan informasi yang diperlukan ketika memulai suatu kegiatan. Identifikasi kebutuhan data bertujuan untuk menentukan kebutuhan data yang diperlukan, mengumpulkan data yang relevan, dan menentukan informasi yang dapat digunakan. Identifikasi kebutuhan data merupakan langkah awal dalam proses pengumpulan data, dan sangat penting untuk menjamin keberhasilan kegiatan yang akan dilakukan.

4.2.1 Fisik Lingkungan

Pada aspek fisik dan lingkungan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, data primer berupa observasi dan wawancara. Pada metode pengumpulan data melalui observasi, data yang ingin diperoleh berupa jenis tanah, dampak dari daerah yang terkena bencana, dan kondisi kawasan permukiman di kecamatan Ilir Timur 1. Untuk metode pengumpulan data melalui wawancara yang berisikan tentang indikator kesesuaian lahan sebagai kawasan permukiman di kecamatan Ilir Timur 1. Selain menggunakan metode data primer, aspek fisik dan lingkungan juga menggunakan metode data sekunder yang berasal dari website, jurnal dan instansi. Data yang akan kami dapat melalui instansi berupa data dan shp topografi, shp permukiman, data dan shp geologi, shp kemiringan lereng, data luas wilayah kecamatan Ilir Timur I, shp dan data jenis tanah, data resiko bencana alam, data historis bencana alam, data kegiatan industri, data faktor lingkungan.

4.2.2 Infrastruktur dan Pergerakan

Pada aspek infrastruktur menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, data primer berupa observasi dan wawancara. Pada metode pengumpulan data melalui observasi, data yang ingin diperoleh adalah persebaran sarana, prasarana dan utilitas yang berada di kawasan perdagangan dan jasa di kecamatan Ilir Timur 1.

Pada metode data sekunder yang digunakan bersumber dari data online seperti website (media populer), jurnal, dan instansi. Data yang dibutuhkan seperti persebaran jaringan jalan, kondisi jaringan drainase dan irigasi, ketersediaan dan kondisi sarana penerangan, kondisi dan kualitas jaringan air bersih, ketersediaan dan jangkauan jaringan air bersih, penyediaan air sebagai memenuhi kebutuhan masyarakat, serta persebaran persampahan dan sebagainya yang menyangkut kondisi kawasan perdagangan dan jasa di kecamatan Ilir Timur 1

4.2.3 Spasial Keruangan

Metode penelitian yang digunakan dalam aspek spasial keruangan yaitu analisis deskriptif, analisis spasial overlay, dan analisis skalogram. Untuk analisis deskriptif sendiri digunakan dalam menggambarkan atau menjelaskan pola ruang dan struktur ruang di Kecamatan Ilir Timur I secara ringkas dan mudah dipahami berdasarkan kajian literatur dari dokumen RTRW Tahun 2012-2032 Kota Palembang. Pada analisis spasial overlay digunakan dalam membandingkan peta rencana pola ruang dan struktur ruang dengan kondisi eksistingnya ketika di lapangan nantinya. Pada analisis skalogram digunakan untuk untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan baik di Kecamatan Ilir Timur I berdasarkan fasilitas yang dimilikinya, dengan demikian dapat ditentukan hierarki pusat – pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan di dua kecamatan tersebut.

4.2.4 Sosial Kependudukan

Aspek Sosial dan Kependudukan dalam melakukan metode penelitian data yang dibutuhkan yaitu data sekunder dan primer dimana untuk data primer terbagi menjadi 3 yaitu dengan metode wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner. Wawancara ditujukan untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan fokus isu strategis Sosial Kependudukan , wawancara ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan setempat dari keseharian masyarakat, adat istiadat yang masih dilaksanakan di daerah Kecamatan Deliniasi. Pada kegiatan observasi ini untuk membantu dalam mengidentifikasikan perbandingan antara data yang didapat dengan kenyataan kondisi penduduk secara langsung di lapangan. Untuk kuesioner sendiri disebarkan untuk mendapatkan informasi kependudukan dengan memunculkan data-data baru yang nanti akan dijadikan perhitungan dan perbandingan.

Untuk data sekunder sendiri pada Sosial Kependudukan dibutuhkan berupa data yang berasal dari beberapa Dinas Pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Dinas Ketenagakerjaan yang mana data yang dibutuhkan berupa data jumlah penduduk, kepadatan penduduk, penduduk berdasarkan umur, mata pencaharian, jumlah anak bersekolah, dan masih banyak lagi selain jumlah dapat juga data berupa statistik.

4.2.5 Sosial Ekonomi

Aspek sosial ekonomi dalam melakukan metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data tersebut meliputi wawancara, kuesioner, observasi yang ditujukan kepada masyarakat dan instansi pemerintah. Pertanyaan dalam wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan terkait aspek sosial ekonomi, dengan fokus pada informasi yang diperoleh dari masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1. Kemudian, untuk data selanjutnya yang dicari adalah data mengenai pendapatan penduduk, data mata pencaharian, data persebaran industri, serta data pengolahan dan pemasaran industri minyak kelapa sawit. Pada data sekunder dalam aspek sosial ekonomi dibutuhkan data yang berasal dari instansi pemerintah serta dinas terkait seperti BPS, Kantor Kecamatan. Data yang dibutuhkan yaitu berupa data tingkat pengangguran di dua kecamatan serta data masyarakat berpenghasilan rendah pada Kecamatan Ilir Timur 1.

4.2.6 Kelembagaan dan Pembiayaan

Pada aspek kelembagaan dan pembiayaan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang berupa wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai dinas-dinas terkait terhadap sektor perdagangan dan jasa, bagaimana alur pemerintah atau cara yang digunakan pemerintah dalam memberikan bantuan serta lembaga apa saja yang terlibat, lalu ada juga wawancara terhadap Dinas Koperasi dan UMKM, BPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Perdagangan dan Jasa yang mewawancarai tentang berapa banyak modal yang diberikan oleh pemerintah terhadap sektor perdagangan dan jasa, program yang direncanakan pemerintah, tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan program, keberhasilan dan apakah ada program yang tidak sesuai target, serta kebijakan pemerintah dalam pengeluaran modal untuk sektor perdagangan dan jasa. Dan yang terakhir ada wawancara terhadap pelaku UMKM terhadap bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM, dan apa yang menjadi penghambat pemerintah dalam memberikan bantuan atau pengeluaran modal untuk meningkatkan sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1. Untuk data sekunder terbagi menjadi beberapa jenis data

yaitu dari website dan jurnal. Data dari website berupa Dokumen kebijakan terkait sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ilir Timur 1.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara peneliti untuk mengumpulkan informasi. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi guna dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, hipotesis, dan juga mencapai tujuan peneliti. Metode pengumpulan data juga merupakan proses yang dilakukan mulai dari penentuan data yang dibutuhkan sudah masuk kedalam metode pengumpulan data hingga ke analisis data yang di dapat. Penelitian apapun pasti memiliki metode pengumpulan data, tidak hanya satu metode saja tapi peneliti juga dapat melakukan lebih dari satu mengumpulkan data, adapun pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

4.3.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan oleh peneliti. Data diambil dengan cara wawancara ataupun observasi untuk mengetahui data apa saja yang ada di lapangan. Pengumpulan data primer setelah wawancara atau observasi pasti menjadi data yang benar benar mentah dan perlu dianalisis untuk dapat mengetahui tujuan dari mengumpulkan data. Pada pengumpulan data primer, dibutuhkan barang barang yang mendukung untuk mengumpulkan data baik wawancara, kuesioner, dan observasi. Alat alat mengukur atau *software* yang mendukung dalam melakukan observasi dan juga menyiapkan kuesioner serta perangkat survey yang nantinya akan ditanyakan ke responden guna mendapatkan jawaban sesuai dengan tujuan yang dituju.

4.3.2 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah pernah digunakan, atau data yang didapat dari internet atau instansi pemerintah tanpa kita perlu turun tangan langsung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pengumpulan data sekunder tidak memakan waktu yang banyak seperti pengumpulan data primer, karena bisa diakses atau didapat dari internet dan yang diperlukan hanya internet dan juga alat untuk mencari informasi seperti laptop, handphone, dan sebagainya.

4.4 Metode Pengumpulan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, dengan bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi

terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki peneliti.

Metode yang dilakukan oleh para surveyor dalam melakukan survey dengan melakukan Random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mengacu pada pengambilan sampel secara acak dari seluruh populasi target. Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, yang tidak ada intervensi tertentu dari peneliti. Random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang paling umum dan sederhana di bidang penelitian. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$nk = ((Nk)/N) \times n$$

Keterangan :

nk = jumlah responden yang dibutuhkan dalam kelurahan ke-k.

Nk = jumlah populasi dalam kelurahan ke-k.

N = jumlah total populasi dalam kecamatan.

n = jumlah total responden yang diinginkan dalam survei.

Perhitungan :

N	: Total Populasi Kecamatan IT 1	67.124
n	: Total responden yang diinginkan	96

$N1$	: Total Populasi Kelurahan 13 Ilir	3.589
$N2$	: Total Populasi Kelurahan 14 Ilir	3.702
$N3$	: Total Populasi Kelurahan 15 Ilir	5.115
$N4$	: Total Populasi Kelurahan 16 Ilir	1.308
$N5$	: Total Populasi Kelurahan 17 Ilir	3.540
$N6$	: Total Populasi Kelurahan 18 Ilir	2.263
$N7$	: Total Populasi Kelurahan 20 Ilir IV	14.903
$N8$	: Total Populasi Kelurahan 20 Ilir I	10.929
$N9$	: Total Populasi Kelurahan 20 ILIR III	9.898
$N10$	: Total Populasi Kelurahan Kepandean Baru	1.696
$N11$	: Total Populasi Kelurahan Sungai Pangeran	10.181

Contoh:

Kelurahan 13 Ilir

$$n1 = (N1/N) \times n$$

$$n1 = ((3.589)/(67.124)) \times 96$$

$$n1=0,053 \times 96$$

$$n1 = 5,088$$

Jumlah responden yang dibutuhkan pada pada Kelurahan 13 Ilir adalah 5 responden. Sehingga jumlah responden yang dibutuhkan di setiap kelurahan adalah

Tabel 4.1 Jumlah responden Kecamatan Ilir Timur 1

Kecamatan Ilir Timur 1	Jumlah Responden
Kelurahan 13 Ilir	5
Kelurahan 14 Ilir	5
Kelurahan 15 Ilir	7
Kelurahan 16 Ilir	2
Kelurahan 17 Ilir	5
Kelurahan 18 Ilir	3
Kelurahan 20 Ilir 4	21
Kelurahan 20 Ilir 1	16
Kelurahan 20 Ilir 3	14
Kelurahan Kepandean Baru	2
Kelurahan Sungai Pangeran	14
Total Responden	94

Sumber: Hasil Pengolahan Excel Studio Proses Perencanaan RB

4.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data. Metode analisis data berbeda-beda tergantung jenis data yang akan dianalisis dan tujuan analisis. Berikut adalah beberapa metode analisis penelitian yang akan digunakan dalam studio proses perencanaan.

4.5.1 Analisis Spasial Overlay

Analisis overlay digunakan untuk melapisi beberapa lapisan kumpulan data yang mewakili tema berbeda secara bersamaan untuk menganalisis atau mengidentifikasi hubungan setiap lapisan. Analisis overlay mewakili peta

komposit dengan kombinasi atribut dan geometri kumpulan data atau entitas yang berbeda. Spasial overlay dilakukan dengan menggabungkan dan menampilkan kumpulan data terpisah yang berbagi seluruh atau sebagian area yang sama. Hasil dari kombinasi ini adalah kumpulan data baru yang mengidentifikasi hubungan spasial.

Jenis-jenis analisis spasial yang terdiri dari overlay antara lain:

1. Union: Menampilkan semua lapisan data terlihat. Contohnya, peta penggunaan tanah + peta jaringan lahan = overlay union
2. Intersect: Menunjukkan sebagian kenampakan yang berpotongan. Contohnya, peta jenis tanah Pulau Kalimantan + peta provinsi Kalimantan Tengah = peta jenis tanah provinsi Kalimantan Tengah
3. Clip: Menampilkan layer input sesuai yang diinginkan
4. Dissolve: Menyatukan atau menghilangkan batas-batas spasial tepat bersebelahan

4.5.2 Analisis Skalogram

Analisis skalogram merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta hirarki pusat. Metode ini menggunakan skala Guttman yang memperjelas kemampuan suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Skalogram hanya melihat dari keberadaan fasilitasnya, dan daerah dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jumlah jenis fasilitas tertinggi dan fasilitas terendah yang ada di dalam satu kecamatan.

Analisis skalogram dilakukan dengan menggunakan rumus yang menghasilkan skor yang menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di suatu wilayah. Setelah bobot tiap fasilitas didapat, maka selanjutnya dihitung indeks sentralitas setiap kecamatan dengan rumus yang menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di suatu wilayah. Dengan rumus sebagai berikut:

$$COR = (T - s) / T$$

Dimana:

T = Jumlah total yang diamati tiap wilayah

S = Jumlah kesalahan

Menentukan banyak kelas:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Dimana:

N = jumlah objek

Menentukan panjang interval:

$$PI = (X_t - X_i) / K$$

Dimana:

X_t = Jumlah fasilitas tertinggi

X_i = Jumlah fasilitas terendah

Metode skalogram berguna dalam mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah. Untuk menentukan orde-orde pusat pelayanan, digunakan metode Struges. Analisis skalogram berguna dalam mengetahui hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat dalam pengembangan wilayah.

4.5.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan sebuah penelitian data yang menggunakan pola sebagai titik awal untuk penelitian lebih mendalam untuk menginformasikan sebuah pengambilan keputusan dan memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang sudah diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Metode Analisis Deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai mean, nilai standar deviasi dan lainnya serta mendapatkan gambaran lebih lengkap terkait data, baik dalam bentuk verbal atau numerik yang berhubungan dengan data yang sedang diteliti.

4.5.4 Analisis Kuantitatif

Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan data numerik. Metode ini memerlukan data yang bersifat numerik dalam jumlah besar dan dapat dihitung menggunakan rumus-rumus statistika. Penggunaan metode ini banyak digunakan dalam penelitian sains dan teknologi. Metode analisis data kuantitatif memerlukan kemampuan menghitung secara akurat dan interpretasi data yang rumit. Metode analisis data kuantitatif dapat digunakan jika kita ingin melakukan penelitian yang bertujuan mengangkat hal yang mengandung objektivitas. Hasil analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk angka-angka yang dijelaskan dengan menguraikan angka-angka tersebut. Untuk menentukan metode analisis data yang tepat kita harus memahami jenis data yang dimiliki dan tujuan adanya penelitian (*Pahami Proses Dan Macam Metode Analisis Data Kuantitatif*, 2021).

Dalam melakukan analisis kuantitatif, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, melakukan validasi data dengan mengecek kembali apakah data yang terkumpul sudah sesuai dengan standar penelitian. Kedua, melakukan editing dengan menyunting data mentah yang telah dikumpulkan. Terakhir, melakukan pengkodean data untuk mengelompokkan data berdasarkan

karakteristiknya agar mudah dianalisis. (*Pahami Proses Dan Macam Metode Analisis Data Kuantitatif*, 2021)

Dalam kegiatan studio proses perencanaan, analisis ini digunakan untuk menghitung sarana, prasarana, dan utilitas yang dibutuhkan dalam aspek infrastruktur. Aspek sosial kependudukan sendiri menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat. Begitu juga dengan aspek ekonomi yang menganalisis data yang di dapat dengan analisis kuantitatif guna mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah.

4.5.5 Analisis Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan data numerik atau berbentuk angka. Data yang diperoleh biasanya bersifat subjektif. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data dalam analisis kualitatif diantara didapat melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei, atau observasi. Dalam beberapa kasus, dilakukan observasi atau pengamatan lebih lanjut sehingga dapat memperoleh data yang berbeda-beda (*Yuk, Kenalan Dengan Teknik Analisis Data Kualitatif!*, 2022).

Ada berbagai macam teknik analisis data kualitatif yang bisa digunakan dalam penelitian. Menurut James P. Spradley, terdapat empat tahapan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:

1. Analisis Domain, yaitu mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau isu sosial yang diangkat.
2. Analisis Taksonomi, yaitu domain dari data yang didapatkan harus ditelaah kembali.
3. Analisis Komponensial, yaitu mengetahui ciri spesifik dari unsur-unsur yang menyusun domain penelitian.
4. Analisis Tema Kultural, yaitu menarik hubungan antar domain data yang sudah diketahui ciri spesifiknya.

Dalam kegiatan studio proses perencanaan, analisis kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh secara visual lalu menelaah atau meninjau data yang telah diperoleh untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

4.5.6 Analisis Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Dari analisis ini akan didapatkan penilaian terhadap potensi lahan yang nantinya akan menjadi acuan untuk menentukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang benar. Selain itu, analisis kemampuan lahan juga dapat digunakan untuk mendukung proses dalam penyusunan rencana penggunaan lahan di suatu wilayah. Hasil analisis kemampuan lahan diharapkan dapat menjadi pedoman penggunaan lahan secara lebih optimal sesuai dengan

harapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi lahan dan merekomendasikan arahan penggunaan lahan berdasarkan kondisi kemampuan lahan eksisting pada daerah penelitian.

4.5.7 Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis kesesuaian lahan adalah proses yang mengumpulkan dan menganalisis data-data yang relevan untuk menentukan keberadaan suatu lahan dalam suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, lahan yang dianalisis adalah lahan yang dianggap cocok untuk digunakan atau dipergunakan untuk suatu tujuan, seperti pertanian, perkebunan, perindustrian, atau perdagangan. Analisis kesesuaian lahan menggunakan sistem informasi untuk membantu masyarakat dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan.

Analisis kesesuaian lahan dapat menggunakan berbagai teknik analisis, seperti analisis data deskriptif kualitatif, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dan membahasnya secara kuantitatif. Dalam hal ini, data yang digunakan dapat berupa informasi geografis, kondisi fisik lahan, sumber daya alam, serta kondisi sosial dan ekonomi di sekitar lahan tersebut. Analisis kesesuaian lahan dapat membantu dalam memilih lahan yang tepat untuk suatu tujuan, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan dan menghemat biaya yang dikeluarkan dalam proses pengembangan lahan tersebut.

4.5.8 Analisis Proyeksi

Proyeksi penduduk menurut Multilingual Demographic Dictionary adalah perhitungan (kalkulasi) yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas dan migrasi dimasa yang akan datang. Dapat diartikan, proyeksi penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Proyeksi diperlukan untuk memprediksi berbagai kemungkinan diperlukan untuk pembangunan saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang (Beti, 2012). Oleh karena itu, diperlukannya solusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dapat dicapai melalui analisis proyeksi penduduk. Adapun rumus proyeksi penduduk yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

Dimana :

P_n = Jumlah penduduk pada tahun n

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar (awal)

r = Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun

n = Jumlah tahun antara tahun yang diproyeksikan

4.5.9 Analisis Produk Domestik regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau provinsi. Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan dan tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada penyajian PDRB terbagi menjadi 2, yaitu:

- **PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**
Pada penyajian PDRB atas dasar harga berlaku, semua angka pendapatan regional/nasional dihitung/dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun yang bersangkutan. PDRB ini menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.
- **PDRB Atas Dasar Harga Konstan**
Pada penyajian PDRB atas dasar harga konstan, semua angka pendapatan regional/nasional dihitung/dinilai atas dasar harga tahun dasar. Karena dihitung berdasarkan harga tahun dasar yang bersifat tetap, maka perkembangan yang terjadi mencerminkan perkembangan riil dan bukan karena pengaruh kenaikan harga (inflasi).

4.5.10 Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan teknik yang digunakan untuk menilai tingkat pengkhususan sektor ekonomi di suatu daerah. Analisis ini mengukur tingkat spesialisasi aktivitas ekonomi melalui perbandingan relatif dengan menggunakan pendekatan ini membandingkan peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah dengan peran yang sama dari sektor yang serupa di wilayah administratif yang lebih luas. Pada analisis ini membantu kita untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah bergantung pada sektor tertentu. Dalam menentukan Analisis Location Quotient (LQ) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{ps}{pl}$$

$$LQ = \frac{Ps}{Pl}$$

Keterangan:

LQ :Location Quotient

ps : Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkat lokal (MIKRO)

pl : Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkat lokal (MIKRO)

Ps : Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkat regional (MAKRO)

Pl : Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkat regional (MAKRO)

4.5.11 Analisis Shift Share

Analisis Shift-share pada lingkup kota dilakukan dengan menghitung PN atau pertumbuhan ekonomi provinsinya sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kotanya.. Komponen Pertumbuhan proporsional (PP) digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan di Kota Palembang, sedangkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) digunakan untuk melihat tingkat daya saing terhadap wilayah lain.

Komponen pertumbuhan nasional (KPN) merupakan perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yg disebabkan oleh perubahan produksi atau kesempatan kerja secara umum, kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan lain yg mampu mempengaruhi sektor perekonomian dalam suatu wilayah.

KPP merupakan komponen proportional shift yaitu komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh pergeseran proporsional yang mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada suatu daerah dibandingkan perekonomian yg lebih luas (nasional/provinsi). KPP bernilai positif ($KPP > 0$) pada wilayah/daerah yang berspesialisasi dalam sektor yg secara nasional tumbuh cepat. KPP bernilai negatif ($KPP < 0$) pada wilayah/daerah yang berspesialisasi dalam sektor yg secara nasional tumbuh lambat.

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (KPPW) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena pergeseran diferensial yang menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor di daerah/kabupaten, dibandingkan dengan sektor yang sama secara provinsi/nasional. KPPW bernilai positif ($KPPW > 0$) pada sektor yang mempunyai keunggulan komparatif (comparative advantage) di wilayah /daerah tsb (daya saing tinggi), KPPW bernilai negatif ($KPPW < 0$) pada sektor yang tidak mempunyai keunggulan komparatif (daya saing rendah).

4.5.12 Analisis Tipologi Klassen Sektoral

Analisis tipologi klassen menurut pendekatan sektoral yaitu memiliki tujuan untuk mengidentifikasi sektor, sub sektor, usaha, atau komoditi unggulan suatu daerah. Kriteria yang digunakan untuk membagi sektor diantaranya:

- Sektor maju dan tumbuh cepat merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral PDRB yang lebih tinggi dibanding rata-rata sektor dari wilayah yang lebih luas (provinsi, negara).
- Sektor maju tapi tertekan merupakan sektor yang memiliki kontribusi sektoral PDRB lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata sektor dari wilayah yang lebih luas (provinsi, negara).
- Sektor Potensial merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat kontribusi sektoral PDRB lebih rendah dibanding rata-rata sektor dari wilayah yang lebih luas (provinsi, negara).

- Sektor relatif tertinggal merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral PDRB yang lebih rendah dibanding rata-rata sektor dari wilayah yang lebih luas (provinsi, negara).

4.5.13 Analisis Tipologi Klassen Wilayah

Analisis tipologi klassen wilayah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Analisis ini membandingkan antara rasio pendapatan per kapita dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah tertentu. Tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan memperhatikan perekonomian yang diacu. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

- Daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Wilayah Makro.
- Daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata Wilayah Makro.
- Daerah berkembang cepat (high growth but low income), daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Wilayah Makro.
- Daerah relatif tertinggal (low growth and low income), daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Wilayah Makro.

4.5.14 Analisis Time Series

Analisis time series merupakan suatu metode statistik yang sangat berguna untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara berurutan dalam periode waktu tertentu. Analisis ini bertujuan untuk memahami tren dan pola data, serta memprediksi nilai di masa yang akan datang.

4.5.15 Analisis Stakeholder

Menurut (Maryono et al.2005) stakeholders dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah stakeholder primer yang merupakan stakeholder yang secara

langsung terkena dampaknya baik dampak positif maupun dampak negatif. Stakeholders ini memiliki pengaruh dan kepentingan dan selalu dilibatkan dalam setiap tahapan kegiatan. Yang kedua adalah stakeholder kunci yaitu yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini stakeholders yang bertanggung jawab dalam Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa guna meningkatkan perekonomian wilayah Kecamatan Ilir Timur I. Yang terakhir adalah stakeholders sekunder atau pendukung merupakan stakeholders yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Analisis stakeholder ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program / proyek.

Tujuan dari analisis stakeholder yaitu :

- Untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholder terhadap kegiatan program / proyek yang sedang berjalan.
- Untuk mengidentifikasi kelembagaan-kelembagaan lokal berikut proses-proses untuk pengembangan kapasitasnya
- Untuk membangun pondasi dan strategi partisipasi masyarakat.
- Hasil analisis stakeholder menjadi peta yang mengidentifikasikan actor kunci dan asesmen pengetahuan, kepentingan, posisi, aliansi, serta pentingnya hal – hal yang terkait dengan kebijakan
- Analisis stakeholder penting untuk merancang strategi politik yang berdampak pada perubahan dan akan menyebabkan interaksi pembuat kebijakan lebih efektif karena langsung berhubungan dengan key stakeholder

Bab V Rencana Kegiatan

5.1 Rencana Kegiatan Studio

Dalam rencana kegiatan studio ini berisikan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan selama satu semester Mata Kuliah Studio Proses Perencanaan dalam rangka mengidentifikasi Isu Masalah dan Potensi wilayah di Kecamatan Ilir Timur I yang ada di Kota Palembang dalam Proses Perencanaan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan Studio Proses Perencanaan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Timeline Studio Selama Satu Semester

Timeline	Minggu															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penetapan Struktur Organisasi Studio																
Presentasi core isu kecamatan (isu kelas) berdasarkan teknik USG																
Perumusan kerangka penelitian: latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, dan sasaran kerja per aspek																
Perumusan tabel kebutuhan data																
Pengolahan, Penyajian, dan Analisis data																
Persiapan Lapangan																
Finalisasi perangkat survei																
Presentasi laporan pendahuluan																

Survei lapangan																	
Menyusun presentasi checklist data yang diperoleh																	
Presentasi Hasil Survei Lapangan dan kompilasi data																	
Menyelesaikan Draft Analisis per aspek																	
Memaparkan dan Menyimpulkan Hasil Analisis setiap aspek																	
Memaparkan Hasil Analisis final Laporan Akhir																	

5.2 Rencana Kegiatan Survey

Rencana kegiatan survei merupakan penyusunan kegiatan yang sudah diatur sedemikian rupa agar proses pelaksanaan survei dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Kegiatan survei Studio Proses Perencanaan ini dilaksanakan pada minggu ke-9 perkuliahan yaitu pada tanggal 25 Maret 2024 – 29 Maret 2024. Kegiatan survei yang dilakukan berupa pengambilan data secara primer ke masyarakat dan dinas terkait serta data sekunder yang bersumber dari instansi dan dinas-dinas terkait di Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Alang-Alang Lebar yang ada di Kota Palembang. Dari kegiatan survei yang dilakukan berikut merupakan tabel rundown kegiatan:

5.3 Alokasi atau Mobilisasi Survey

Tabel 2. Tabel Nama Kelompok

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
Deffrant	Reinaldi	Jhon	Isan
Andika	Izreel	Firman	Marcel
Ajeng	Arum	Yumna	Tari
Azzahra	Mestika	Septi	Amanda
Sisca	Cita	Sasya	Anisa
Jelita	Inez	Fahni	Triana
Rahma	Maria	Elizabet	Devi
Silvia	Grace	Amey	

Tabel 3. Tabel Timeline Survey Studio

HARI	WAKTU	PJ / KOOR	KEGIATAN	TEMPAT	PARTISIPAN
Minggu, 24 Maret 2024	07.00 - 08.00	Korlap	Berkumpul di ITERA	ITERA	31 orang
	08.00 - 08.30	Korlap	Loading barang ke dalam bus	ITERA	31 orang
	08.30 - 09.00	Ketua & Korlap	Briefing	ITERA	31 orang
	09.00 - 15.00	Korlap	Berangkat menuju Kota Palembang	Perjalanan	31 orang
	15.00 - selesai	Korlap	Sampai di basecamp	Basecamp	31 orang

	16.00 - 18.00	Korlap	Bersih-bersih basecamp	Basecamp	31 orang
	18.00 - 20.30	Individu	Buka Puasa dan Tarawih	Basecamp	31 orang
	20.30 - selesai	PJ Aspek, Ketua & Korlap	Memperiapkan data yang dibutuhkan untuk survei dan diskusi kelas	Basecamp	31 orang
Senin, 25 Maret 2024	03.30 - 05.00	Korlap	Bangun dan Sahur	Basecamp	31 orang
	05.00 - 06.00	Individu	MCK	Basecamp	31 orang
	06.00 - 07.00	Korlap	Persiapan survei	Basecamp	31 orang
	07.00 - 11.30	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang
	11.30 - 13.00	Individu	Istirahat	Lokasi survei / instansi	31 orang
	13.00 - 16.00	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang
	16.00 - 18.00	PJ Data	Menginput dan olah data survei	Basecamp	31 orang

	18.00 - 20.30	Individu	Buka Puasa dan Tarawih	Basecamp	31 orang
	20.30 - selesai	PJ Aspek & PJ Data	Diskusi kelas dan Mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk survei	Basecamp	31 orang
Selasa, 26 Maret 2024	03.30 - 05.00	Korlap	Bangun dan Sahur	Basecamp	31 orang
	05.00 - 06.00	Individu	MCK	Basecamp	31 orang
	06.00 - 07.00	Korlap	Persiapan Survei & Audiensi	Basecamp	31 orang
	07.00 - selesai	Perwakilan Kelas	Audiensi dengan pihak Pemerintahan	Instansi terkait	2 orang
	07.00 - 11.30	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang
	11.30 - 13.00	Individu	Istirahat	Lokasi survei / instansi	31 orang
	13.00 - 16.00	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang

	16.00 - 18.00	PJ Data	Menginput dan olah data survei	Lokasi survei / instansi	31 orang
	18.00 - 20.30	Individu	Buka Puasa dan Tarawih	Basecamp	31 orang
	20.30 - selesai	PJ Aspek & PJ Data	Diskusi kelas dan Mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk survei	Basecamp	31 orang
Rabu, 27 Maret 2024	03.30 - 05.00	Korlap	Bangun dan Sahur	Basecamp	31 orang
	05.00 - 06.00	Individu	MCK	Basecamp	31 orang
	06.00 - 07.00	Korlap	Persiapan survei	Basecamp	31 orang
	07.00 - 11.30	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang
	11.30 - 13.00	Individu	Istirahat	Lokasi survei / instansi	31 orang
	13.00 - 16.00	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang
	16.00 - 18.00	PJ Data	Menginput dan olah data survei	Basecamp	31 orang

	18.00 - 20.30	Individu	Buka Puasa dan Tarawih	Basecamp	31 orang
	20.30 - selesai	PJ Aspek & PJ Data	Diskusi kelas dan Mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk survei	Basecamp	31 orang
Kamis, 28 Maret 2024	03.30 - 05.00	Korlap	Bangun dan Sahur	Basecamp	31 orang
	05.00 - 06.00	Individu	MCK	Basecamp	31 orang
	06.00 - 07.00	Korlap	Persiapan survei	Basecamp	31 orang
	07.00 - 11.30	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang
	11.30 - 13.00	Individu	Istirahat	Lokasi survei / instansi	31 orang
	13.00 - 16.00	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang
	16.00 - 18.00	PJ Data	Menginput dan olah data survei	Basecamp	31 orang
	18.00 - 20.30	Individu	Buka Puasa dan Tarawih	Basecamp	31 orang

	20.30 - selesai	PJ Aspek & PJ Data	Diskusi kelas dan Mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk survei	Basecamp	31 orang
Jumat, 29 Maret 2024	03.30 - 05.00	Korlap	Bangun dan Sahur	Basecamp	31 orang
	05.00 - 06.00	Individu	MCK	Basecamp	31 orang
	06.00 - 07.00	Korlap	Persiapan survei	Basecamp	31 orang
	07.00 - 11.30	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang
	11.30 - 13.00	Individu	Istirahat	Lokasi survei / instansi	31 orang
	13.00 - 16.00	PJ Aspek & Korlap	Pengambilan Data Survei (Masing-masing aspek)	Lokasi survei / instansi	31 orang
	16.00 - 18.00	PJ Data	Menginput dan olah data survei	Basecamp	31 orang
	18.00 - 20.30	Individu	Buka Puasa dan Tarawih	Basecamp	31 orang
	20.30 - selesai	PJ Aspek & PJ Data	Diskusi kelas dan Mengolah data yang	Basecamp	31 orang

			telah di dapat		
Sabtu, 30 Maret 2024	03.30 - 05.00	Korlap	Bangun dan Sahur	Basecamp	31 orang
	05.00 - 07.00	Individu	MCK	Basecamp	31 orang
	07.00 - 09.00	Korlap	Persiapan pulang menuju ITERA	Basecamp	31 orang
	09.00 - 09.30	Ketua & Korlap	Briefing	Basecamp	31 orang
	10.00 - 15.00	Korlap	Berangkat menuju Kota Lampung	Perjalanan	31 orang
	15.00 - selesai	Korlap	Sampai di ITERA	ITERA	31 orang

5.4 Struktur Organisasi

Pelindung	:Dekan Fakultas Teknologi dan Infrastruktur Kewilayahan
Penanggung Jawab	: Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA Asirin, S. T., M. T.
Pembimbing	: Dosen Studio Proses Perencanaan Dian Prasetyaning Sukmawati, S.T., M.T. Mentari Pratami, S.Si., M.Si.
Asisten Studio	: Sardo Tinambunan (121220112) Kristina Natalia Br S (121220117)
Ketua Studio RB	: Jhon Kaleb Simarmata (122220076)
Wakil Ketua Studio RB	: Reinaldi M. Alif (122220131)
Sekretaris	: Maria Angelina (122220166) Arum Wulandari (122220146)
Bendahara	: Yumna Najwa Ikhsan (122220070)
Koordinator Lapangan	: Izreel Rivaldo Sitompul (122220187) M. Ihsan Riandi (122220003)

	M. Andhika Refaldy	(122220136)
	Deffrant Marisi R.P.	(122220185)
PJ Laporan	: Amey Shifa W.H.	(122220051)
	Amandha Agus Zintia	(122220009)
PJ PPT	: Sasya Mekka Sari	(122220091)
	Rahma Fira Anisa	(122220053)
PJ Data	: Najla Thifa Ajeng S.	(122220181)
	Noer Allma Cita Izah	(122220183)
PJ Peta	: M. Andhika Refaldy	(122220136)

Tabel 4. Tabel Daftar Nama Peserta Kelas

No.	Nama	NIM
1	M.IHSAN RIANDI	122220003
2	FIRMAN LAOLI	122220006
3	ANNISA OKTAFIANASARI	122220008
4	AMANDHA AGUS ZINTIA	122220009
5	SILVIA RIVANI	122220023
6	TARI YUSAR FALAS	122220024
7	FAHNI EKA SAPUTRI	122220035
8	INEZ KENYA PAMUNGKAS	122220037
9	AMEY SHIFA WULANDARI HIDAYAT	122220051
10	RAHMA FIRA ANISA	122220053
11	MARCHEL WINANZA	122220068
12	AZZARA TRI NANDA	122220072
13	YUMNA NAJWA IKHSAN	122220070
14	JHON KALEB SIMARMATA	122220076
15	SASYA MEKKA SARI	122220091
16	DEVI RIA ANANTA PERMATA SARI	122220092
17	JELITA MEILANI SIMBOLON	122220105
18	MESTIKA RAHMAH	122220106

19	GRACE NATAMA REHULINA	122220125
20	SISCA ANANDA CELINE	122220129
21	REINALDI M. ALIF	122220131
22	MUHAMMAD ANDHIKA REFALDY	122220136
23	TRIANA SEPTIANI	122220144
24	ARUM WULANDARI	122220146
25	MARIA ANGELINA SIAGIAN	122220166
26	SEPTIA HANIFAH	122220167
27	NAJLA THIFA AJENG SALWA	122220181
28	NOER ALLMA CITA IZAH	122220183
29	DEFFRANT MARISI RAJA PARDEDE	122220185
30	IZREEL RIVALDO SITOMPUL	122220187
31	ELIZABETH ANGIE JESSICA	122220210

5.5 Rencana Anggaran Belanja

Tabel 5. Tabel Anggaran Belanja

RANCANGAN ANGGARAN BELANJA STUDIO PROSES PERENCANAAN KELAS RB 2024					
NO	KEBUTUHAN	QUANTITY		HARGA SATUAN	JUMLAH
		JUMLAH	SATUAN		
RONA AWAL					
1	Rona Awal	1	orang	Rp500,000	Rp500,000
SUBTOTAL 1					Rp500,000
SURVEY					

TRANSPORT					
3	PERJALANAN PERGI	1	unit	0	0
4	PERJALANAN PULANG	1	unit	0	0
5	SEWA MOTOR	15	5	Rp100,000	Rp7,500,000
6	BENSIN MOTOR	15	5	Rp20,000	Rp1,500,000
7	TRASHBAG	2	pack	Rp20,000	Rp40,000
SUBTOTAL 2					Rp9,040,000
BELANJA BARANG					
7	PLAKAT	1	buah	Rp75,000	Rp75,000
8	KERTAS A4	1	rim	Rp50,000	Rp50,000
9	ATK	1	paket	Rp50,000	Rp50,000
10	OBAT P3K	1	paket	Rp75,000	Rp75,000
11	MAP BIASA	1	pack	Rp20,000	Rp20,000
12	LISTRIK	1	meteran	Rp300,000	Rp300,000
13	ID CARD ANGGOTA KELAS	31	buah	Rp15,000	Rp465,000
14	ID CARD DOSEN	2	buah	Rp15,000	Rp30,000
15	ID CARD ASISTEN STUDIO	2	buah	Rp15,000	Rp30,000
SUBTOTAL 3					Rp1,095,000
BELANJA JASA					
12	PENGINAPAN/KONTRAKAN	1	unit	Rp4,000,000	Rp4,000,000
13	LEMBAR WAWANCARA	250	lembar	Rp500	Rp125,000

14	LEMBAR KUISIONER	250	lembar	Rp500	Rp125,000
15	LEMBAR OBSERVASI	250	lembar	Rp500	Rp125,000
16	MATRIKS KEBUTUHAN DATA	25	lembar	Rp500	Rp12,500
17	PROPOSAL PERIZINAN	1	dokumen	Rp100,000	Rp100,000
18	CETAK LAPORAN PENDAHULUAN	1	dokumen	Rp100,000	Rp100,000
SUBTOTAL 4					Rp4,587,500
KONSUMSI					
18	KONSUMSI MAHASISWA (2x sehari, 7 hari)	7	hari	Rp930,000	Rp6,510,000
19	KONSUMSI ASISTEN	2	orang	Rp60,000	Rp120,000
20	KONSUMSI DOSEN	2	orang	Rp60,000	Rp120,000
21	AIR MINUM	15	galon	Rp20,000	Rp300,000
SUBTOTAL 5					Rp7,050,000
PASCA SURVEY					
23	CETAK LAPORAN FAKTA ANALISIS	2	dokumen	Rp400,000	Rp800,000
24	CETAK X-BANNER	2	buah	Rp100,000	Rp200,000
25	CETAK BANNER	2	buah	Rp50,000	Rp100,000
26	CETAK ALBUM PETA	2	dokumen	Rp200,000	Rp400,000
SUBTOTAL 6					Rp1,500,000
TOTAL PENGELUARAN					

SUBTOTAL 1					Rp500,000
SUBTOTAL 2					Rp9,040,000
SUBTOTAL 3					Rp1,095,000
SUBTOTAL 4					Rp4,587,500
SUBTOTAL 5					Rp7,050,000
SUBTOTAL 6					Rp1,500,000
TOTAL PENGELUARAN					Rp19,185,000
BIAYA TAK TERDUGA (12%)					Rp2,302,200
TOTAL AKHIR					Rp21,487,200
BIAYA IURAN					Rp693,135
					PEMBULATAN Rp700,000

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). <http://e-journal.uajy.ac.id/7517/3/MTS202088.pdf>
- (n.d.). Badan Pusat Statistik. Retrieved March 19, 2024, from
<https://palembangkota.bps.go.id/>
- (n.d.). BPS Prov Sumatera Selatan. Retrieved March 19, 2024, from
<https://sumsel.bps.go.id/>
- (n.d.). Wikipedia. Retrieved April 17, 2024, from
<https://migas.esdm.go.id/post/read/perdagangan-jasa-sektor-energi>
- (n.d.). UU 11 Tahun 2009. Retrieved April 17, 2024, from
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf>
- (2009, June 3). YouTube: Home. Retrieved March 19, 2024, from
<https://datanesia.id/memetakan-peluang-ekonomi-wilayah-palembang/>
- (2009, June 3). YouTube: Home. Retrieved March 19, 2024, from
<https://www.scribd.com/document/601988740/Tujuan-Analisis-Stakeholder>
- Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.* (n.d.). Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Retrieved March 19, 2024, from
<https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/KRITERIAUMKM>
- Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.* (n.d.). Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Retrieved March 19, 2024, from
<https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/KRITERIAUMKM>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa saja yang termasuk dalam kategori Infrastruktur yang dimasukkan dalam Laporan Belanja Infrastruktur Yang Bersumber dari Transfer ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum ?*
- (n.d.). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved February 27, 2024, from
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-yang-termasuk-dalam-kategori-infras>

struktur-yang-dimasukkan-dalam-laporan-belanja-infrastruktur-yang-bersumber-dari-transfer-ke-daerah-yang-penggunaannya-bersifat-umum

KELEMBAGAAN. (n.d.). Repository. Retrieved March 19, 2024, from

https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/10807/5.%20KELEMBAGAAN_compressed.pdf?isAllowed=y&sequence=5

Pahami Proses dan Macam Metode Analisis Data Kuantitatif. (2021, September 18).

DQLab. Retrieved February 27, 2024, from

<https://dqlab.id/pahami-proses-dan-macam-metode-analisis-data-kuantitatif>

Pengertian Industri, Jenis, Contoh, dan Tujuannya. (n.d.). Gramedia. Retrieved March

19, 2024, from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-industri/>

Pengertian Pembiayaan. (n.d.). hestanto. Retrieved March 19, 2024, from

<https://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/>

Sektor Jasa Juga Diatur dalam UU Perdagangan. (2014, February 13). Hukumonline.

Retrieved April 17, 2024, from

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sektor-jasa-juga-diatur-dalam-uu-perdagangan-lt52fc80c5beb6f/>

22 BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori dan kebijakan yang berkaitan dengan tema penelitian. (n.d.). Elibrary Unikom.

Retrieved March 19, 2024, from

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2487/8/UNIKOM_LUSIA%20ELSA%20DIKA%20DAMAYANTY_BAB%20II.pdf

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG

PERBANKAN D. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved March 19, 2024, from

https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/UU_NO_10_1998%20Tentang%20Perbankan.PDF

UU No. 7 Tahun 1992 - Ketentuan Terkait. (1992, March 25). Lembaga Penjamin

Simpanan. Retrieved March 19, 2024, from

https://lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-no-7-tahun-1992

UU No. 7 Tahun 1992 - Ketentuan Terkait. (1992, March 25). Lembaga Penjamin

Simpanan. Retrieved March 19, 2024, from

https://lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-no-7-tahun-1992

Yuk, Kenalan dengan Teknik Analisis Data Kualitatif! (2022, March 2). Majoo. Retrieved

February 27, 2024, from

<https://majoo.id/solusi/detail/teknik-analisis-data-kualitatif>